



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2019 – 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU



Samsat Tanjak



SAMSAT DRIVE THRU



5S Senyum Salam Sapa Sopan Santun



Samsat Tanjak



e-Samsat Riau



humasbapenda.riau@gmail.com



badanpendapatan.riau.go.id



@bapendariau



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2022

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR 30

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini telah selesai disusun. Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019 - 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dimaksud, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau serta mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik *intern* maupun *extern* organisasi.

Di samping sebagai Dokumen Perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur di Provinsi Riau yang tercinta ini.

Pekanbaru, Juli 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19751001 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel v

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN PROVINSI RIAU 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

2.1.1 Tugas dan Fungsi 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16

2.3 Kinerja Pelayanan 22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 27

2.4.1 Tantangan 27

2.4.2 Peluang 27

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS 29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 29

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 34

3.2.1 Visi 34

3.2.2 Misi 35

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 36

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 38

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 39

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN 45

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 45

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 48

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 52

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 52

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 110

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah 110

BAB. VIII PENUTUP 112

8.1 Penutup 112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD	3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Riau	12
Gambar 2.1.2	Bagan Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan	15
Gambar 2.1.3	Bagan Organisasi Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan	16
Gambar 2.2	Keadaan Golongan Ruang/Pangkat PNS Tahun 2021.....	17
Gambar 2.3	Keadaan PNS Menurut Jabatan /Eselenoring Tahun 2021.	18
Gambar 2.4	Tingkat Pendidikan PNS Bapenda Provinsi Riau Tahun 2021	19
Gambar 2.5	Keadaan PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	20
Gambar 5.1	Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Riau 2019 - 2024	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapenda Menurut Golongan / Pangkat Tahun 2021	17
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapenda Menurut Jabatan / Esselonering Tahun 2021	18
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapenda Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021	19
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapenda Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	20
Tabel 2.5	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Bapenda Berdasarkan Esselon dan Golongan Tahun 2021	20
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (2019-2024) Provinsi Riau	24
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (2019-2024)	25
Tabel 2.6	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Kerja Sama Dengan Beberapa Instansi Terkait	26
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH	35
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Bapenda Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong	38
Tabel 3.4	Analisis SWOT	43
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2020-2024)....	46
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	51
Tabel T-C. 27	Rencana program, kegiatan dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2020	55
Tabel T-C. 27	Rencana program, kegiatan dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2021-2024	61
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (2019-2024).....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) digambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan manifestasi kontrak politik Kepala Daerah terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 tersusun atas dasar tindak lanjut pelaksanaan: (i) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; (iv) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024. Perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara bertahap, terukur, efisien dan berorientasi pada hasil.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi ini praktis membuat Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan restrukturisasi anggaran guna mengatasi upaya pencegahan penularan wabah Covid-19. Hal ini berdampak pada konsistensi dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Selain itu juga dikeluarkannya regulasi terbaru tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

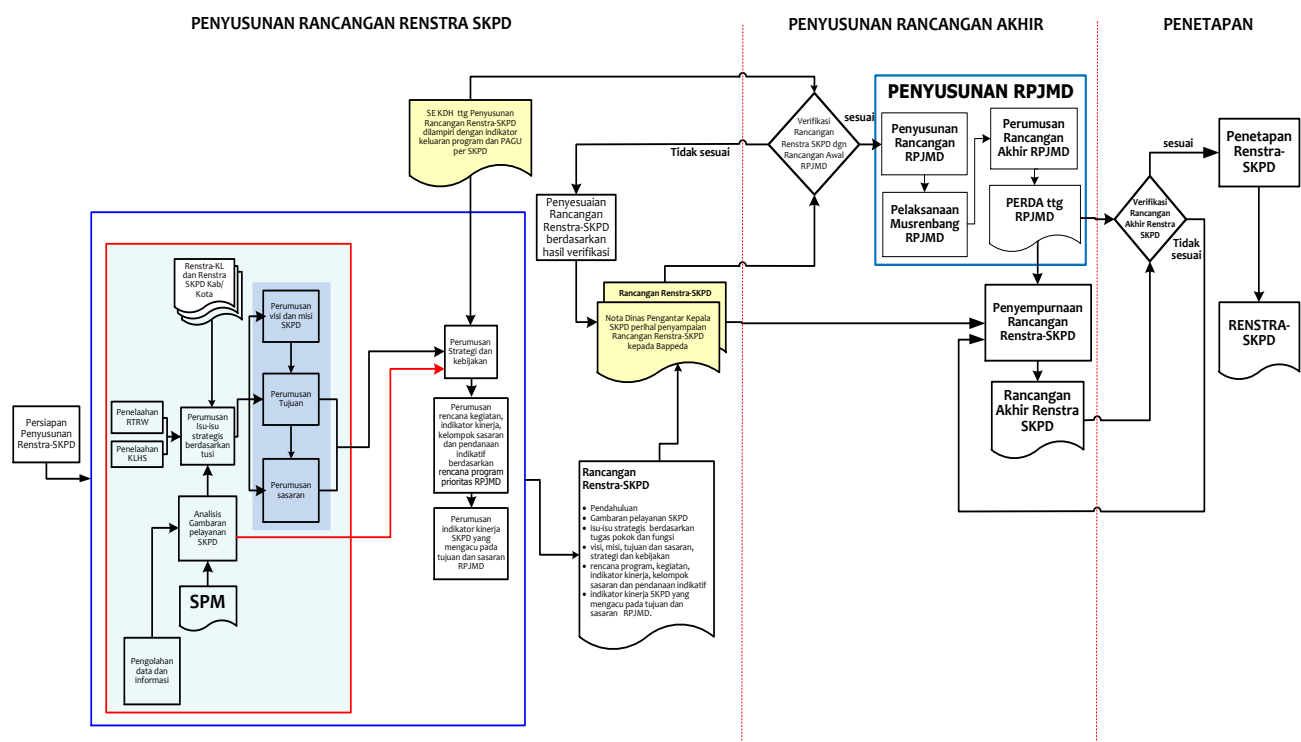
1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan

7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan Perubahan terhadap Rencana Starategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2019 - 2024. Perubahan yang dilakukan atas pertimbangan perubahan kerangka ekonomi daerah dan kaitannya dengan pencapaiin tujuan perangkat daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau akan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 – 2024.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 – 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dengan visi **“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”** dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah khususnya pada tahap/periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Hubungan Rencana Strategis Renstra (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Dasar Hukum

Renstra Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, yang merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah dibidang keuangan pada sektor pendapatan daerah
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Riau, tugas pokok Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah menyelenggarakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 adalah guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Riau serta mempertajam hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah teralisasi pada Tahun 2019-2020.

Adapun Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Startegis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah, Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penyesuaian terhadap kebijakan dan nomenklatur.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan Rencana Starategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau dapat tercapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tahun 2019-2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Pelaporan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau , sedangkan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau,diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor : 93 Tahun 2016, adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah provinsi Riau terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Perencanaan Program
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pajak Daerah
 - a. Subbidang Penerimaan PKB dan BBNKB
 - b. Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah

4. Bidang Retribusi, PADL dan Dana Bagi Hasil
 - a. Subbidang Penerimaan Retribusi dan PADL
 - b. Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 - c. Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
5. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
 - a. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi
 - b. Subbidang Pengembangan Pendapatan
 - c. Subbidang Pengolahan Data Pendapatan
6. Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
 - a. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah
 - c. Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan

2.1.1 Tugas Dan Fungsi

I. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

II. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Kepala Bidang Pajak Daerah

- (1) Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pajak Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

- (1) Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

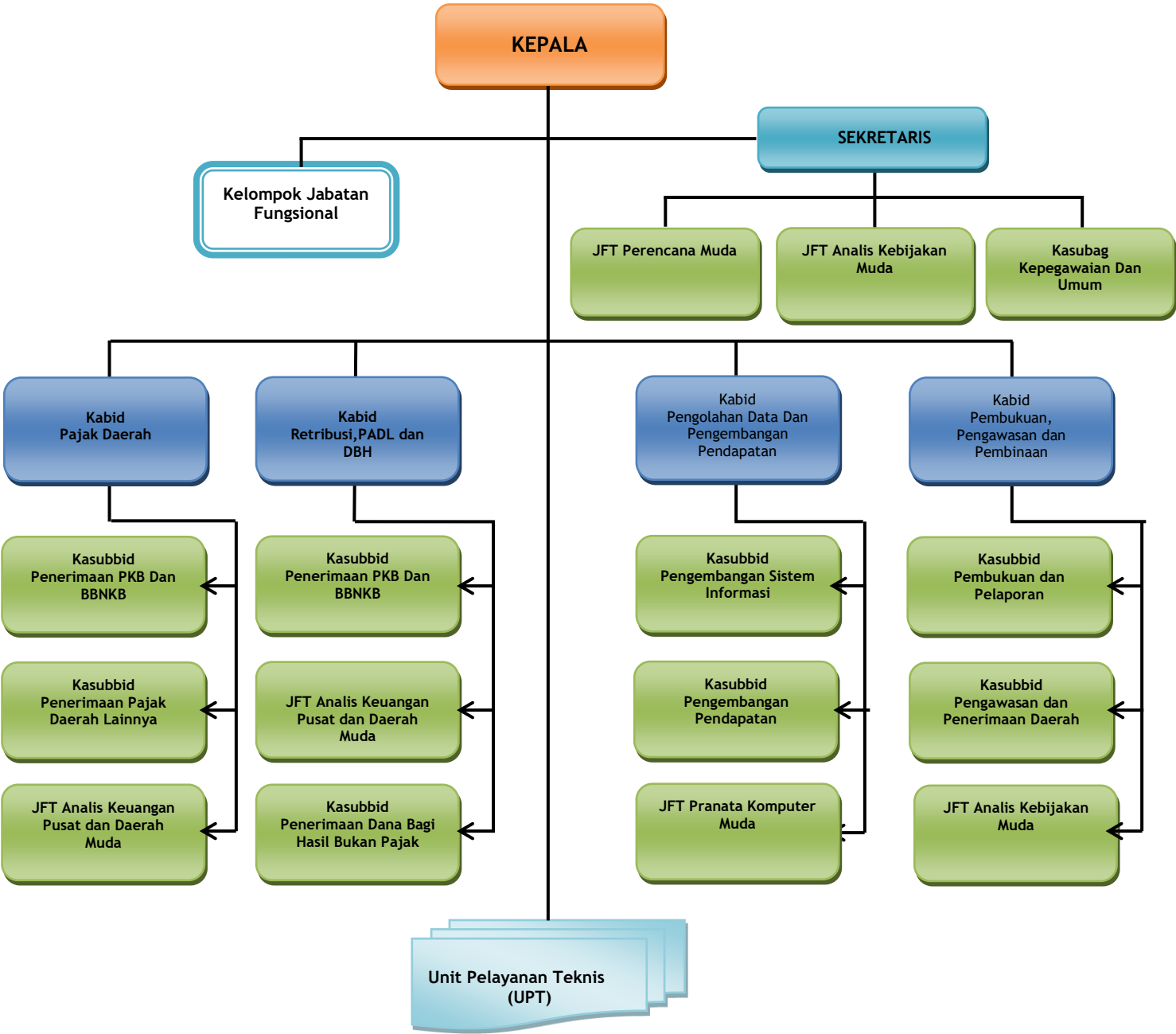
- (1) Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

- (1) Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya berikut Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat pada Gambar 2.1.1 di bawah ini :



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai Badan Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Provinsi Riau mempunyai 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan dan 23 Unit Pelaksana (UP) Pengelolaan Pendapatan yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota se-Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Adapun Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tersebut terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang (Kelas A)
2. UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat (Kelas A)
3. UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan (Kelas A)
4. UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota (Kelas A)
5. UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga (Kelas A)
6. UPT Pengelolaan Pendapatan Dumai (Kelas A)
7. UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian (Kelas A)
8. UPT Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci (Kelas A)
9. UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan (Kelas A)
10. UPT Pengelolaan Pendapatan Duri (Kelas A)
11. UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang (Kelas A)
12. UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi Api (Kelas B)
13. UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura (Kelas B)
14. UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang (Kelas B)
15. UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu (Kelas B)
16. UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang (Kelas B)
17. UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis (Kelas B)
18. UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai (Kelas B)
19. UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung (Kelas B)
20. UPT Pengelolaan Pendapatan Panam (Kelas B)
21. UP Pengelolaan Pendapatan Kandis
22. UP Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam
23. UP Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu
24. UP Pengelolaan Pendapatan Kateman
25. UP Pengelolaan Pendapatan Kempas Raya
26. UP Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kuras
27. UP Pengelolaan Pendapatan Singingi Hilir
28. UP Pengelolaan Pendapatan Kepenuhan
29. UP Pengelolaan Pendapatan Tambusai
30. UP Pengelolaan Pendapatan Ujung Tanjung
31. UP Pengelolaan Pendapatan Kuantan Mudik
32. UP Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri
33. UP Pengelolaan Pendapatan Tapung Hilir
34. UP Pengelolaan Pendapatan Kota Baru Keritang
35. UP Pengelolaan Pendapatan Air Molek
36. UP Pengelolaan Pendapatan Belilas
37. UP Pengelolaan Pendapatan Baserah

- 38. UP Pengelolaan Pendapatan Rupert
- 39. UP Pengelolaan Pendapatan Bandar Sei Kijang
- 40. UP Pengelolaan Pendapatan Ukui
- 41. UP Pengelolaan Pendapatan Pujud
- 42. UP Pengelolaan Pendapatan Pinggir
- 43. UP Pengelolaan Pendapatan Samsat Keliling

UPT Pengelolaan Pendapatan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah yang bersifat teknis operasional di bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Pengelolaan Pendapatan Kelas A menyelenggarakan fungsi :

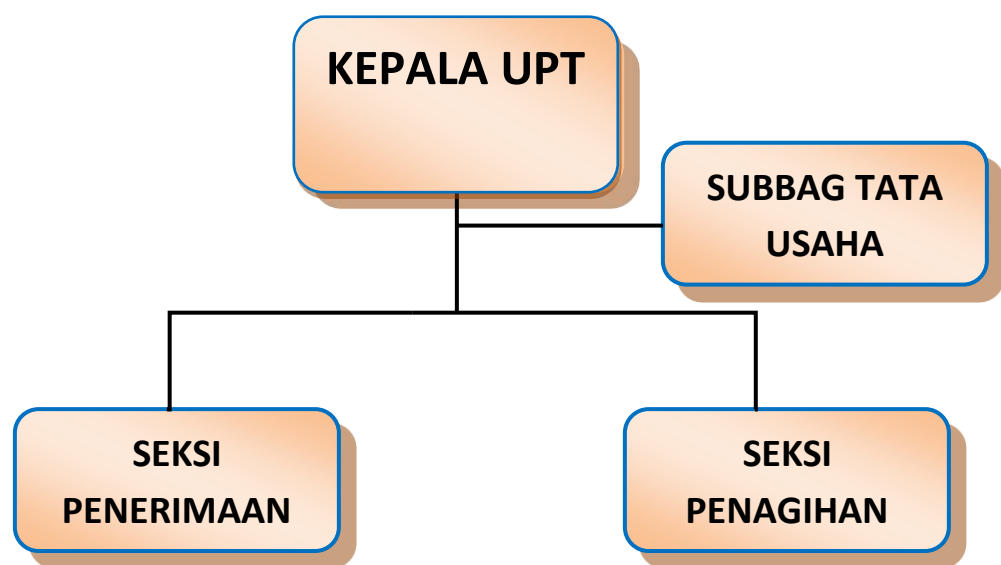
- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan, dan Seksi Penagihan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan, dan Seksi Penagihan.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan, dan Seksi Penagihan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala badan terkait tugas dan fungsinya.

Sementara itu, untuk UPT Pengelolaan Pendapatan Kelas B menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha.
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala badan terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.2
Bagan Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Pengelolaan Pendapatan Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 79 Tahun 2017
Tanggal : 27 Desember 2017

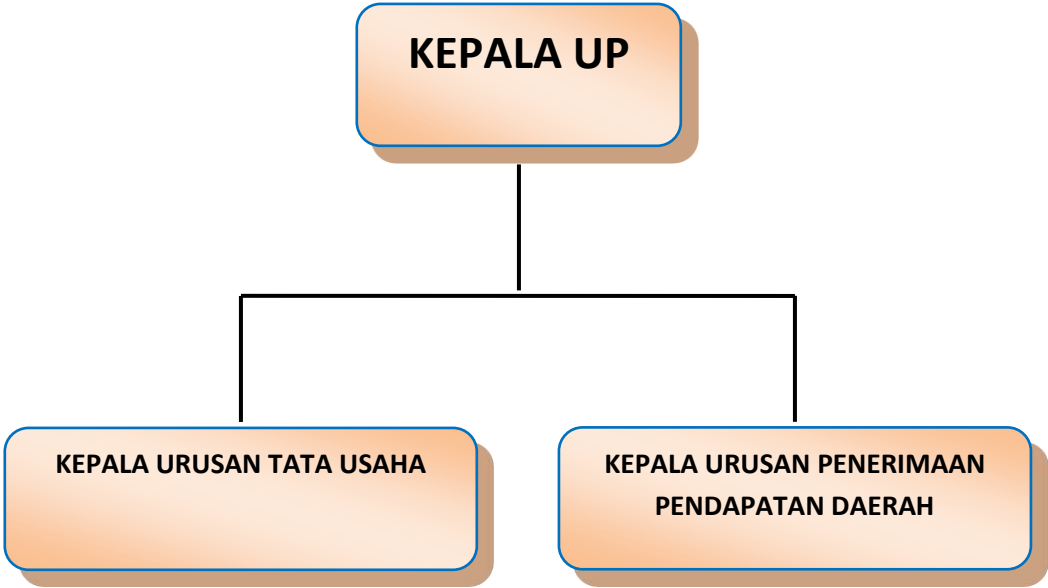


Adapun untuk Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pemungutan pendapatan daerah yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah. Adapun UP menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pemungutan di Bidang Perpajakan, serta pelayanan Samsat dalam pengurusan Pajak Daerah (PKB, Pajak AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di kantor Pembantu Samsat yaitu Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- c. Membuat laporan penerimaan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan tembusan disampaikan kepada kepala UPT Pengelolaan Pendapatan serta Kas Daerah Provinsi Riau.
- d. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
- e. Membantu segala kegiatan UPT Pengelolaan Pendapatan.
- f. Menyampaikan laporan segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kas Daerah Provinsi Riau dan tembusannya disampaikan kepada Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Gambar 2.1.3
Bagan Organisasi Unit Pelayanan (UP)
Pengelolaan Pendapatan Provinsi Riau

Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau
Nomor : 05 Tahun 2013
Tanggal : 18 Februari 2013



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau memiliki sumber daya aparatur sebanyak 427 orang terdiri dari 248 laki-laki dan 179 perempuan, yang tersebar di Kantor Pusat dan 42 UPT / UP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau didukung dengan 427 orang Pegawai Negeri Sipil dengan perincian sebagai berikut :

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan/Pangkat

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berjumlah sebanyak 427 orang, yang didominasi oleh Golongan III, yang berjumlah 324 orang atau 75,88%, Golongan Ruang/Pangkat terkecil adalah Golongan II yang berjumlah 49 orang atau 11,48%, sedangkan untuk Golongan IV berjumlah 54 orang atau 12,65%.

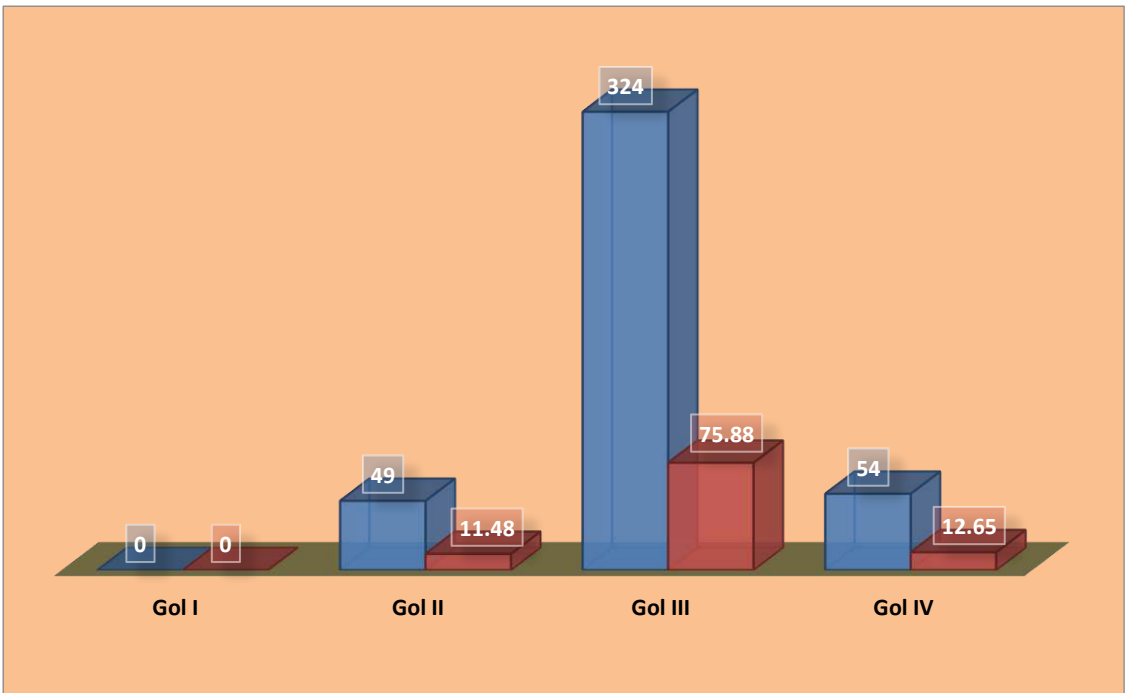
Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Menurut Golongan/Pangkat Tahun 2021

NO.	GOLONGAN RUANG/PANGKAT	JUMLAH	%
1.	Golongan IV	54	12,65
2.	Golongan III	324	75,88
3.	Golongan II	49	11,48
4.	Golongan I	0	0,00
JUMLAH		427	100,00

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan/pangkat dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2.2
Keadaan Golongan Ruang/Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Esselonering

Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berjumlah 427 orang, berdasarkan jabatan/eselonering dapat dilihat sebagaimana data pada tabel 2.5 berikut ini :

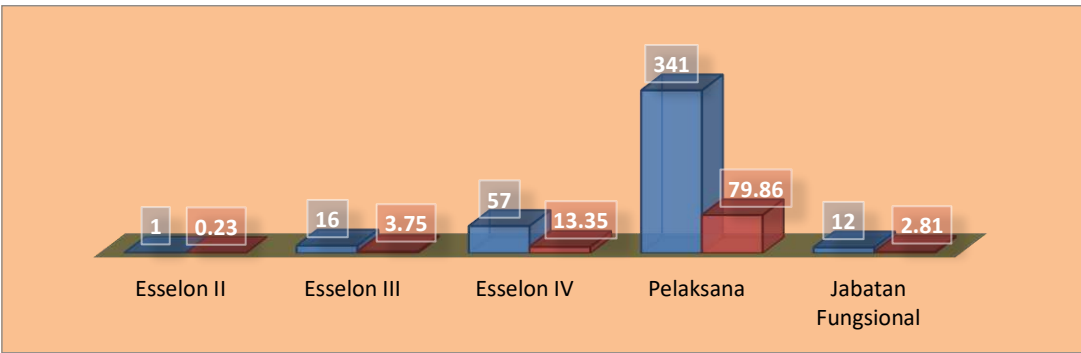
Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Menurut Jabatan/Esselonering Tahun 2021

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

NO.	JABATAN/STAF	JUMLAH	%
1.	Esselon II	1	0,23
2.	Esselon III	16	3,75
3.	Esselon IV	57	13,35
4.	Pelaksana	341	79,86
5.	Jabatan Fungsional	12	2,81
JUMLAH		427	100,00

cara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2.3
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Esselonering Tahun 2021



Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

Dari data pada Tabel 2.5 diketahui bahwa Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Esselonering di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, didominasi oleh Jabatan Pelaksana yang berjumlah 341 orang atau 79,86%. Untuk esselon IV berjumlah 57 orang atau 13,35%, untuk esselon III berjumlah 16 orang atau 3,75% yang tersebar di Kantor Dinas Induk dan pada sejumlah UPT/UP se-Provinsi Riau, sedangkan untuk Jabatan Fungsional berjumlah 12 orang atau 2,81%.

c. **Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan**

Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 427 orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 75 orang atau 17,56% yang berpendidikan Sarjana Strata II dan yang berpendidikan Sarjana Strata I sejumlah 237

orang atau 55,50% dan SLTA berjumlah 81 atau 18,97% dapat lihat dari tabel 2.6 berikut ini :

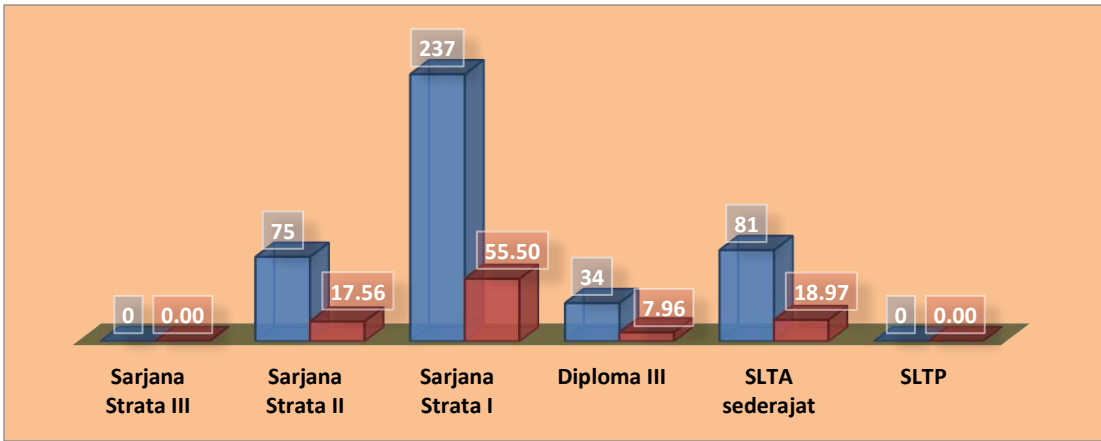
Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2021

NO.	JABATAN/STAF	JUMLAH	%
1.	Sarjana Strata III (S-3)	-	-
2.	Sarjana Strata II (S-2)	75	17,56
3.	Sarjana Strata I (S-1)	237	55,50
4.	Diploma (D-III)	34	7,96
5.	SLTA Sederajat	81	18,97
6.	SLTP	-	-
JUMLAH		427	100,00

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2.4
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, didukung dengan 427 orang Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah pegawai laki-laki adalah 251 orang atau 58,78% dan perempuan berjumlah 176 orang atau 41,22% dari jumlah keseluruhan pegawai dengan perincian sebagai berikut :

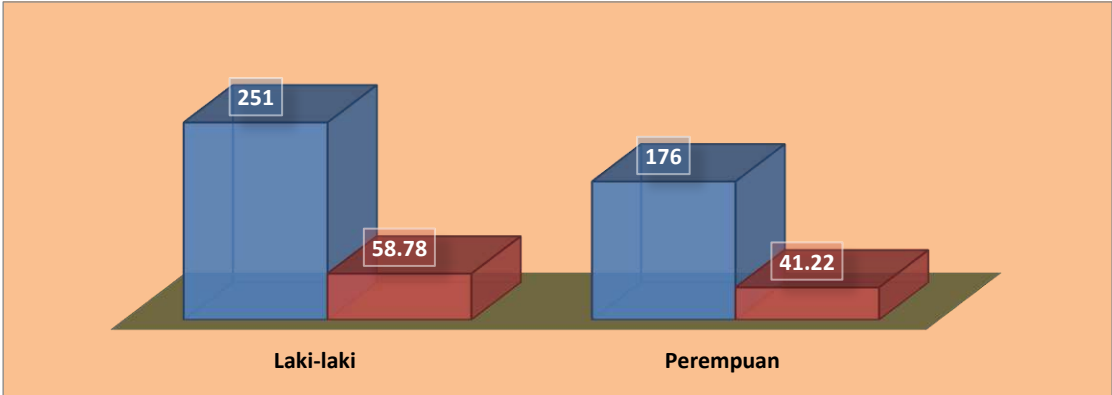
Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO.	GOLONGAN RUANG/PANGKAT	JUMLAH	%
1.	Laki-Laki	251	58,78
2.	Perempuan	176	41,22
JUMLAH		427	100,00

Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin dapat dilihat gambar berikut ini :

Gambar 2.5
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber : Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau Tahun 2021

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau
Berdasarkan Esselon dan Golongan Tahun 2021

No.	BIDANG / UPT / UP	JUMLAH
I. SEKRETARIAT/BIDANG		
1	SEKRETARIAT	33
2	BIDANG PENGOLAHAN DATA	18
3	BIDANG PAJAK DAERAH	21
4	BIDANG RETRIBUSI, PADL DAN DANA BAGI HASIL	18
5	BIDANG PEMBUKUAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN	19
II. UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)		
1	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA	31
2	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA	26
3	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI	11
4	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI	17
5	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG	13
6	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI	12
7	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN	14

No.	BIDANG / UPT / UP	JUMLAH
8	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PENGARAIAN	9
9	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT	15
10	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN	9
11	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG	13
12	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDRAPURA	9
13	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS	6
14	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SIAPI-API	10
15	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU	7
16	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG	7
17	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG	12
18	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI	12
19	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM	10
20	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG	7
	III. UNIT PELAYANAN (UP)	
1	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN UJUNG TANJUNG	3
2	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN AIR MOLEK	4
3	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA BARU KERITANG	3
4	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN UJUNG BATU	3
5	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KURAS	3
6	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KANDIS	4
7	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN SINGINGI HILIR	4
8	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KUANTAN MUDIK	3
9	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KAMPAR KIRI	4
10	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN TAMBUSAI	2
11	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KEPENUHAN	2
12	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KATEMAN	2
13	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN BANDAR SEI KIJANG	1
14	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN UKUI	1
15	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG HILIR	1
16	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN PUJUD	1
17	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN RUPAT	1
18	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN PINGGIR	1
19	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KANDIS	4
20	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN LUBUK DALAM	1
21	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN BASERAH	1
22	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN BELILAS	1
23	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN KEMPAS JAYA	1
24	UP PENGELOLAAN PENDAPATAN SAMSAT KELILING	9
25	MALL PELAYANAN PUBLIK	4
26	SAMSAT DRIVE THRU	4
	J U M L A H	427

2. Sarana dan Prasarana

- Aset / Modal

Aset yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 antara lain berupa :

- a. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di satu Kantor Dinas Induk , 20 UPT dan 23 UP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang tersebar di 12 Kabupaten / Kota se-Riau.
- b. Kendaraan, terdiri dari :
 1. Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 42 unit
 2. Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 78 unit
 3. Kendaraan Khusus Samsat Keliling sebanyak 5 unit

3. Unit Pelayanan yang masih operasional

Sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibantu oleh 43 Unit Pengelolaan Pendapatan pelayanan yang terdiri dari 20 kantor UPT Pengelolaan Pendapatan dan 23 kantor UP Pengelolaan Pendapatan yang tersebar di 12 kabupaten / kota se-Riau, 1 pelayanan samsat keliling, 1 loket pelayanan pada Mall Pelayanan Publik kota Pekanbaru, serta 1 loket pelayanan pada Samsat Drive Thru.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan publik.

2.3. Kinerja Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, ini dapat terlihat dari penerimaan pajak daerah yang meningkat dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Terdapat tiga jenis pajak yang terus dioptimalkan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau setiap tahunnya.

Selain itu, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam setiap tahunnya tentunya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau juga harus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan.

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka kewenangan Provinsi Riau seperti yang dimaksud terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (2019-2024)
Provinsi Riau

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Pendapatan Daerah			Angka Pendapatan Daerah (juta rupiah)	8.736.933	9.183.965	8.656.846	8.226.767	8.647.077	8.622	9.383	-	-	-	98,7	99,3	-	-	-
				Persentase Pendapatan Asli Terhadap pendapatan Daerah (%)	38	44	54	-	-	39.90	42,12	-	-	-	100.21	95,73	-	-	-
				Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Rasio Efektivitas Dana Transfer															
				Rasio Efektivitas Lain-Lian Pendapatan Yang Sah															
				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	76	85	90	92	95	76	77	-	-	-	100	90,5	-	-	-

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (2019-2024)
Provinsi Riau

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	124,221,174,376.09	173,855,335,632.00	178,887,776,831.00	175,491,017,879.81	178,545,366,734.32	91,853,376,803.00	143,232,286,769.70	-	-	-	74%					831,000,671,453.22	235,085,663,572.70
BELANJA TIDAK LANGSUNG	124,221,174,376.09	-	-	-	-	91,853,376,803.00	-	-	-	-	74%					124,221,174,376.09	91,853,376,803.00
Belanja Pegawai	124,221,174,376.09					91,853,376,803.00					74%					124,221,174,376.09	91,853,376,803.00
BELANJA LANGSUNG	30,802,961,600.00	-	-	-	-	25,431,220,724.00	-	-	-	-	80%					30,802,961,600.00	25,431,220,724.00
Belanja Barang dan Jasa	30,802,961,600.00					25,431,220,724.00					83%					30,802,961,600.00	25,431,220,724.00
Belanja Modal	771,039,000.00					590,480,390.00					77%					771,039,000.00	590,480,390.00
BELANJA OPERASI	-	163,424,095,695.00	173,914,740,632.00	172,186,017,879.81	175,840,366,734.32	-	137,256,430,245.32	-	-	-		84%				685,365,220,941.13	137,256,430,245.32
Belanja Pegawai		126,545,078,614.00	127,721,406,755.00	130,275,834,890.10	132,881,351,587.90		105,787,583,394.00					84%				517,423,671,847.00	105,787,583,394.00
Belanja Barang dan Jasa		36,879,017,081.00	46,193,333,877.00	41,910,182,989.71	42,959,015,146.42		31,468,846,851.32					85%				167,941,549,094.13	31,468,846,851.32
BELANJA MODAL	-	10,431,239,937.00	4,973,036,199.00	3,305,000,000.00	2,705,000,000.00	-	5,975,856,524.38	-	-	-		57%				21,414,276,136.00	5,975,856,524.38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		5,372,440,453.00	2,217,713,754.00	3,280,000,000.00	2,680,000,000.00		4,197,365,452.50					78%				13,550,154,207.00	4,197,365,452.50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		5,033,799,484.00	2,725,705,000.00	-	-		1,778,491,071.88					35%				7,759,504,484.00	1,778,491,071.88
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		25,000,000.00	29,617,445.00	25,000,000.00	25,000,000.00		-					0%				104,617,445.00	-

Dalam rangka Optimalisasi peningkatan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait, diantaranya :

Tabel 2.6
Optimalisasi Peningkatan Pendaatan Daerah
Kerja sama Dengan Beberapa Instansi Terkait

NO	NOMOR & TANGGAL KESEPAHAMAN	INSTANSI	SUBSTANSI KESEPAHAMAN
1	100/BPD/III/2017/766 dan 015/MoU/2017 Tanggal 20-10-2017	-Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau & -PT. Bank Riau Kepri	Layanan Perbankan, Pemanfaatan Jaringan Kantor, E-Chanel PT. Bank Riau Kepri dan Pembangunan Aplikasi Pelayanan Penerimaan Daerah
2	Kpts.46/KSB/X/2017 dan 04/wjp.02/2017 Tanggal 20-10-2017	-Pemerintah Provinsi Riau & -Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	Koordinasi Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak daerah dan Retribusi Daerah
3	13/KSB/X/2018 dan 03/Mou/KABPH/2018 Tanggal 17-10-2018	-Pemerintah Provinsi Riau & -Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Pertukaran Data Konsumsi Konsumen Pengguna Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Provinsi Riau
4	P/03/SP/2018 dan 100/BPD/2018/140 Tanggal 9-2-2018 P/1/SP/2019 dan 033/HD/Bapenda/121 Tanggal 19-2-2019	-Pemerintah Provinsi Riau & - PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau	-Penetapan Jumlah Alokasi Hibah Daerah Yang Akan Diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau -Perubahan Penetapan Jumlah Alokasi Hibah Daerah Yang Akan Diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

2.4.1 Tantangan

Untuk meningkatkan pengembangan pelayanan dan pencapaian target kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terdapat tantangan yang harus dihadapi diantaranya, :

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, sehingga pelayanan publik harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan;
2. Pengaruh resesi ekonomi akibat wabah covid-19 di beberapa kawasan dunia, termasuk Indpnesia, Khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan restrukturisasi anggaran guna mengatasi upaya pencegahan penularan wabah Covid-19;
3. Potensi obyek pajak dan retribusi daerah yang baru harus terus digali dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
4. Harmonisasi dengan instansi vertikal, OPD penghasil dalam membangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
5. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

2.4.2 Peluang

Disamping tantangan yang dihadapi, terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, yaitu :

1. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan penetapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan kesempatan bagi daerah untuk memperluas sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
2. Perekonomian Provinsi Riau yang terus mengalami pertumbuhan yang positif menjadikan seluruh potensi sumberdaya yang potensial dapat dimanfaatkan dan dikelola secara efektif, sehingga hal ini dapat dijadikan sumber-sumber baru pendapatan daerah, seperti penggunaan air permukaan, penggunaan lahan, pengelolaan sumberdaya kehutanan, sumberdaya perairan, penggunaan alat berat, dan sebagainya;
3. Investasi di Pemerintah Provinsi Riau, terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan publik yang semakin berkualitas baik secara fisik maupun kinerjanya, seperti pelabuhan, terminal, jalan, rumah sakit dan fasilitas lainnya, dapat merupakan potensi penerimaan daerah tanpa harus mempengaruhi/membeban sektor investasi lainnya;
4. Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang terus ditingkatkan di berbagai bidang guna memenuhi pelayanan publik yang prima;
5. Letak geografis Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, dan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga dapat merangsang investor untuk berinvestasi;
6. Perkembangan dunia usaha yang semakin positif di Provinsi Riau, baik milik Negara/Daerah (BUMN/D) maupun milik swasta, telah memberikan peluang untuk mengembangkan kerjasama timbal balik dalam rangka pengembangan usaha yang dikelola oleh dunia usaha yang bersangkutan maupun dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal;
Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah, sarana dan prasarana yang kurang memadai merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas.
2. Regulasi terhadap penerapan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi daerah belum terakomodir dan terealisasi dengan baik;

Meskipun secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib Pajak tersebut. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam penerapan sanksi di bidang hukum Pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan Sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya.

3. Belum optimalnya koordinasi kepada opd penghasil, Pemerintah Kab / Kota maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah, terutama yang menyangkut dengan data penerimaan daerah; Koordinasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil senantiasa memberikan kontribusi yang sangat luas, sebagai Koordinator Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan koordinasi terkait pencatatan pendapatan yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, sehingga hasilnya nanti akan dimasukkan kedalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Koordinasi seharusnya dilakukan dengan Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah, potensi-potensi baru harus terus di gali sehingga Pendapatan Daerah dapat meningkat dari waktu ke waktu, Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah inilah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Terjadinya penurunan pendapatan daerah akibat pandemi Covid – 19;

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi ini praktis membuat Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Pemerintah Daerah Provinsi Riau melakukan restrukturisasi anggaran guna mengatasi upaya pencegahan penularan wabah Covid-19. Hal ini berdampak pada konsistensi dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

5. Sistem Pemutakhiran Data, Penggolongan, Penetapan, Pengolahan Basis Data, Sistem Pembayaran/Penagihan, Dan Pelayanan Lainnya Kepada Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Tidak Pernah Dilakukan Pembaharuan. Pemutakhiran data menjadi bagian yang sangat penting dalam mengelola pendapatan secara keseluruhan, mulai dari sistem pembayaran/penagihan dan pelayanan kepada wajib pajak, Update data base menjadi poin penting, data yang dinformasikan kepada wajib pajak adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan, dan memiliki kesamaan dengan data yang dikeluarkan oleh mitra kerja dalam mengelola pendapatan daerah.

Adapun Solusi yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pendapatan tersebut antara lain :

1. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau harus memiliki standar pelayanan minimal, dengan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan publik, secara bertahap memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik, memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, Memperluas jangkauan pelayanan perpajakan daerah melalui pengembangan armada Samsat Keliling (Samkel), Samsat Antar Jemput Antar Kampung (Tanjak), membuka Unit Pembantu (UP), Samsat Drive Thru dan pembayaran pajak kendaraan secara elektronik (e-Samsat/Signal);
2. Perlu dibuat regulasi sangsi yang mengikat kepada Wajib Pajak, dengan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan sangsi, memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada wajib pajak tentang sangsi pajak. Meningkatkan inventarisasi dan pemanfaatan aset

- daerah, termasuk melalui kemitraan dengan Pihak Ketiga, melakukan revisi Perda Retribusi Daerah dan mengoptimalkan penerapannya;
3. Melaksanakan operasi penertiban pajak secara terpadu;
 4. Melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi daerah dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota, mengintensifkan sosialisasi Perda Retribusi serta menegaskan penerapan *good corporate governance* pada BUMD;
 5. Melakukan kerjasama dengan BPH Migas tentang data Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) BBM di Provinsi Riau dan melakukan penelusuran badan usaha pemegang IUNU yang melakukan operasional di wilayah Provinsi Riau;
 6. Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan RI dan BPJS Kesehatan terkait besaran kontribusi daerah dalam dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan guna mengurangi angka pemotongan pajak rokok;
 7. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan wajib pajak PBB-KB dan melakukan operasi secara terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-KB;
 8. Optimalisasi penerimaan retribusi daerah sebagai sumber PAD dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
 9. Melakukan koordinasi, evaluasi dan mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD sehingga tercapai target yang ditetapkan;
 10. Sinkronisasi terkait tata kelola aset daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretariat Daerah;
 11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi transfer ke daerah dan dana desa, baik dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK);
 12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, Kepulauan Riau dalam hal pertukaran data dan informasi serta pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak;
 13. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tidak melakukan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun berjalan untuk menjaga kontinuitas likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Riau;

14. Kebijakan pemberian keringanan/penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor guna mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya di masa pandemic Covid-19;
15. Membuat aplikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat mengakomodir kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dengan adanya aplikasi ini nantinya diharapkan tersedianya kebutuhan data yang update, dan memiliki kesamaan dengan data mitra (Kepolisian, Jasa Raharja).

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga Pendapatan Daerah di Provinsi Riau perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pendapatan daerah secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
	Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal,	a. Pelayanan belum optimal (SDM) b. Sarana dan Prasarana belum mendukung c. SOP/SPM belum terakomodir dengan baik	a. Tidak pernah mendapat pelatihan khusus terkait pelayanan Publik; b. Anggaran Sarana dan Prasarana belum memadai; c. Komitmen dan kebijakan tentang SOP/SPM tidak diterapkan.
	Regulasi terhadap penerapan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi daerah belum terakomodir dan terealisasi dengan baik.	a. Masyarakat/Perusahaan tidak taat membayar pajak dan retribusi;	a. Komitmen dalam menerapkan sanksi pajak dan retribusi masih sangat lemah; b. Kurangnya Informasi dan sosialisasi terkait sanksi pajak dan retribusi.
	Belum optimalnya koordinasi kepada OPD penghasil, Pemerintah Kab / Kota, maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah, terutama yang menyangkut dengan data penerimaan daerah.	a. Angka Penerimaan Daerah menjadi tidak akuntable dan menjadi asumsi dalam penyusunan APBD b. Potensi pajak dan retribusi yang berada diwilayah Kabupaten/Kota tidak dapat ditagih c. DBH yang diterima	a. Lemahnya Koordinasi Perhitungan target dan realisasi; b. Peluang potensi pajak dan retribusi baru yang terabaikan; c. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendistribusikan DBH ke Daerah.

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Terjadinya penurunan pendapatan daerah akibat pandemi Covid - 19;	Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan	Terjadi Restrukturisasi terhadap fokus prioritas pembangunan pada masa pandemi covi-19
	Sistem Pemutakhiran Data, Penggolongan, Penetapan, Pengolahan Basis Data, Sistem Pembayaran/Penagihan, Dan Pelayanan Lainnya Kepada Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Tidak Pernah Dilakukan Pembaharuan	Tidak seragamnya data yang dimiliki Badan Pendapatan daerah dengan data yang dimiliki oleh mitra kerja (Kepolisian, Jasa Raharja, BUMD) tentang Wajib Pajak, Tunggakan Pajak, dan data Realisasi.	Belum terintegrasinya aplikasi Badan Pendapatan Daerah dengan Mitra (Kepolisian, Jasa Raharja, BUMD).

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Merupakan tahap ketiga pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan kepada pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumber daya manusia yang berkualitas didukung oleh system informasi yang handal.

Dengan mempertimbangkan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Riau periode 2019-2024 sebagai berikut :

3.2.1. VISI

Visi Gubernur Riau terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”**.

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan Unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdaya** : – Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)
- Saing** : – Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
 - Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
- Sejahtera** : – Mengurangi ketimpangan sosial
 - Menanggulangi kemiskinan
 - Menurunkan tingkat pengangguran
- Bermartabat** : – Meningkatkan kehidupan beragama
 - Melestarikan adat istiadat
 - Mengembangkan nilai sosial dan budaya
- Unggul** : – Prestasi di bidang seni, budaya dan agama
 - Prestasi di bidang olahraga
 - Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
 - Terobosan dan inovasi daerah

3.2.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan visi Provinsi Riau 2019-2024 maka misi pembangunan jangka menengah, meliputi:

- Misi 1** : Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- Misi 2** : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Misi 3** : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- Misi 4** : Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- Misi 5** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Hubungan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Visi Misi Kepala Daerah seperti tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi Kepala Daerah sesuai Tusi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.	Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal	- Minimnya Pelatihan untuk ASN tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait pelayanan publik - Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal	- Mengikuti pelatihan/seminar-seminar tentang pelayanan publik - Memperbaiki kekurangan fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal
		Regulasi terhadap penerapan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi daerah belum terakomodir dan terealisasi dengan baik	- Tata kelola pelaksanaan penerapan sangsi kepada wajib pajak dan retribusi belum berjalan	- Membentuk tim pelaksana - Menyempurnakan Regulasi penerapan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi
		Belum optimalnya koordinasi kepada OPD penghasil, Pemerintah Kab / Kota, maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah, terutama yang menyangkut dengan data penerimaan daerah	- Schedule Rapat Koordinasi yang belum terjadwal dengan baik - Validasi angka perhitungan target dan realisasi	- Rapat Koordinasi dilakukan secara berkala dan terjadwal dengan baik - Konsistensi terhadap angka target dan realisasi
		Terjadinya penurunan pendapatan daerah akibat pandemi Covid – 19	Diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah akibat wabah covid-19	Memberikan alternatif Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dimasa pandemic covid-19
		Sistem Pemutakhiran Data, Penggolongan, Penetapan, Pengolahan Basis Data, Sistem Pembayaran/Penagihan, Dan Pelayanan Lainnya Kepada Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Tidak Pernah Dilakukan Pembaharuan	Belum terintegrasinya kebutuhan data pada system yang tersedia saat ini	Ketersediaan aplikasi yang dapat mengintegrasikan data menjadi satu data base, Pembayaran/Penagihan, Dan Pelayanan Lainnya Kepada Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rensta Kabupaten/Kota

Telaah yang dilakukan terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014–2019 juga berperan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dari sektor Dana Perimbangan. Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang Transfer ke Daerah (desentralisasi fiskal), yaitu:

1. Efisiensi belanja Negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan pembagian tugas, kewenangan, dan urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Reformulasi transfer ke daerah;
3. Sinkronisasi dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

4. Penguatan taxing power;
5. Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam mendorong stimulus pembangunan daerah.

Strategi di bidang Transfer ke Daerah akan ditempuh melalui:

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan antar pusat dan daerah;
2. Mempercepat pengalihan anggaran desentralisasi fiskal langsung ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah;
3. Penyempurnaan perhitungan alokasi DAU dengan mengurangi proporsi alokasi dasar (gaji PNSD);
4. Penyempurnaan perhitungan Netto untuk menentukan pagu DAU dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit dalam jangka panjang;
5. Pengalihan bertahap dana dekon/TP menjadi DAK secara bertahap;
6. Pengalokasian dana penyesuaian untuk tunjangan pendidikan;
7. Pelaksanaan secara konsisten PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemda, Pemkot agar dapat mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Penyusunan grand design desentralisasi fiskal.

Selain Dana Perimbangan Keuangan yang merupakan dana transfer dari pusat, pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Daerah juga dipengaruhi oleh penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan dengan salah satu strategi, yaitu penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan road map industry rokok.

Berdasarkan hasil telaah terhadap pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya dan kondisi pada saat ini Bapenda Provinsi Riau menemukan permasalahan, serta faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bapenda Provinsi Riau Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan

NO	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	1. Meningkatnya pendapatan daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat Ketergantungan terhadap penerimaan pajak masih cukup tinggi	Potensi pajak daerah masih sangat tinggi
		Penetapan Tarif pajak masih rendah	Penerimaan pajak daerah tidak optimal	Tarif pajak daerah masih kecil
		Database Pajak Aktual dan Potensial tidak sesuai dengan database kendaraan	Masih belum akuratnya database pajak aktual dan potensial	Melakukan rekonsiliasi Database Kendaraan dan Database Pajak Aktual dan Potensial bersama Polri
		Belum optimalnya organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi	Lamanya waktu proses sinkronisasi Regulasi perbankan dengan sistem pengelolaan pendapatan daerah	Sinergisitas yang baik antar mitra pengelola pendapatan daerah, sehingga terbuka peluang untuk pendanaan pengembangan aplikasi oleh mitra kerja
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pendapatan daerah	Menjaga kualitas pelayanan di Semua UPT/UP	Sarana dan Prasarana yang belum optimal	Adanya peluang/potensi untuk membuka unit layanan pajak pada setiap unit jaringan layanan Bank Riau Kepri
		Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Lokasi kantor UPT/UP yang jauh dari jangkauan wajib pajak	Memulai kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan mitra yang jangkauan wilayah operasinya luas

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW Provinsi Riau yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ditinjau dari implikasi RT/RW. Mengingat tupoksi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RT/RW.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT. Ada beberapa isu strategis yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, salah satunya adalah **“Pembangunan di Provinsi Riau Masih Bertumpu Pada Dana Perimbangan Sebagai Sumber Utama Pendapatan Provinsi Riau”**. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan cara dan strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari pembangunan daerah. Karena pendapatan asli daerah memiliki kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah juga menjadi indikator kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah, baik itu untuk pembangunan dan pelayanan publik. Semakin tinggi dan besar Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, maka hal ini memperlihatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Hasil identifikasi isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

A. Peluang Eksternal

I. Politik

Kecenderungan politik yang telah dan sedang berkembang akan memberikan peluang:

1. Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya sebagai perubahan dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi

- Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
 3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
 4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Riau yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang menjadi potensi pendapatan daerah.

II. Ekonomi

Perkembangan bidang ekonomi yang turut memberikan peluang dengan adanya kontribusi positif dan situasi kondusif adalah:

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat dan mengalami laju pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun;
2. Potensi Sumber Daya Alam dan peluang investasi yang besar dan belum dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah umumnya, dan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

III. Sosial

Beberapa trend sosial yang terjadi di masyarakat memberikan peluang antara lain:

1. Masyarakat yang heterogen dengan struktur wilayah daratan yang dominan sehingga memberikan ruang gerak dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah;
2. Menguatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan clean government dan good governance disertai dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik sebagai kompensasi atas kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

IV. Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menawarkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengelolaan data dan arus informasi.

V. Kolaborator dan Kompetitor

1. Adanya delegasi kewenangan di antara badan-badan unit pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat memecahkan masalah antara Bapenda sebagai koordinator penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Adanya 34 Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah;
3. Adanya BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi Riau;
4. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
5. Makin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun media massa dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.

B. Ancaman Eksternal

I. Ekonomi

1. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol non-BM yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau;
2. Tidak Stabilmnya Harga Komoditas Utama Riau Terutama Sektor Perkebunan yang berpengaruh langsung pada pendapatan masyarakat Riau;
3. Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui show room tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II);
4. Adanya pengaruh resesi ekonomi beberapa kawasan di dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil.

Hal ini mengakibatkan:

- ❖ Gejolak perekonomian global sehingga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal;
 - ❖ Tunggakan pajak yang diakibatkan penarikan dealer/penyedia kredit terhadap kendaraan bermotor;
 - ❖ Penurunan kemampuan daya beli masyarakat akibat tidak stabilnya harga hasil perkebunan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

II. Sosial

Masih adanya penolakan wajib pajak/wajib retribusi daerah.

III. Teknologi

1. Belum optimalnya transfer informasi dan teknologi dari Pusat ke Daerah;

2. Kemampuan utilities teknologi belum optimal.

IV. Kolaborator

Belum optimalnya koordinasi upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dari masing-masing pihak.

C. Kekuatan Internal

1. Kebijakan pemutihan pajak;
2. Kebijakan penetapan pajak progressif;
3. Bapenda Provinsi Riau merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Riau;
4. Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan PATDA;
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan;
7. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai;
8. Terdapat 20 UPT dan 23 UP yang tersebar di 12 Kabupaten/kota;
9. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak;
10. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait;
11. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.

D. Kelemahan Internal

1. Pelayanan pembayaran pajak belum optimal dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis Informasi Teknologi;
2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak;
4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan;
5. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS;
6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar;
7. Rendahnya kemampuan utilities teknologi;
8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPT dan UP;
9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal;
10. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.

Tabel 3.4
Analisis SWOT
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES)	TANTANGAN (THREATS)
	- UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang memberikan otonomi kepada daerah; - UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Reformasi di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000; . - UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau - Komitmen Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk meningkatkan PAD; - Potensi Sumber Daya Alam dan pariwisata yang besar; - Perkembangan teknologi informasi yang pesat; - Perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat; - Terdapat 34 OPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah; - Terdapat BUMN dan BUMD di wilayah Prov. Riau; - Kebijakan Pemutihan Pajak; - Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal); - Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Prov. Riau; - Terdapat kebijakan Kementerian Keuangan tentang PMK.	- Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol non-BM yang beroperasi di wilayah Prov. Riau; - Pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal; - Adanya kebijakan Bank Indonesia tentang batasan minimal uang muka (DP) untuk pengambilan kredit kendaraan bermotor; - Belum optimalnya kontribusi/sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BUMN maupun BUMS kepada Pemerintah Provinsi Riau; - Perkembangan BUMD belum menggembirakan sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kecil; - Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui show room tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II); - Adanya pengaruh resesi ekonomi beberapa kawasan di dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil; - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak; - Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan Pendapatan Daerah).
FAKTOR INTERNAL	STRATEGI SO	Strategi ST
KEKUATAN (STRENGHT) : - Kebijakan penetapan pajak progressif; - Bapenda Provinsi Riau merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Riau; - Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan PAD; - Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau - Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan; - Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai; - Terdapat 20 UPT dan 23 UP yang tersebar di 12 Kabupaten/kota; - Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak; - Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait; - Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.	Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang - Reformasi birokrasi organisasi; - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui upaya perbaikan mutu pelayanan	Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); - Meningkatkan penerimaan bagian Dana Perimbangan; - Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

KELEMAHAN (WEAKNESSES) :	Strategi WO	Strategi WT
Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang 1. Pelayanan pembayaran pajak belum menggunakan sistem informasi komputerisasi berbasis teknologi; 2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak; 3. Kurangnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak; 4. Belum optimalnya system evaluasi dan tindak lanjut pelayanan; 5. Kurangnya penerapan disiplin PNS; 6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar; 7. Rendahnya kemampuan utilizez teknologi; 8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB; 9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal; 10. Belum pernah dilakukan kajian kepuasan pelanggan; 11. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.	Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman 1. Peningkatan kualitas SDM melalui upaya pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan; 2. Meningkatkan disiplin pegawai melalui pendekatan formal dan informal.	Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana organisasi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 menunjang visi Gubernur yaitu **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”** dan menunjang Misi 5 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”**.

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi Riau. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran (impact) yang terukur, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk misi 5 **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”** dirumuskan dengan tujuan : **“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel”**.

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur tersebut, Bapenda Provinsi Riau merumuskan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Adapaun tujuan dari Bapenda Provinsi Riau adalah **“Tercapainya Pendapatan Daerah”** dengan sasaran strategisnya adalah **“Meningkatnya pendapatan daerah”** dan **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (2020-2024)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tercapainya Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya pendapatan daerah	Angka Pendapatan Daerah (juta rupiah)	8.736.933	9.183.965	8.656.846	8.226.767	8.647.077
			Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	100%	100%	100%
			Rasio Efektivitas Dana Transfer	-	-	100%	100%	100%
			Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pendapatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	85	90	92	95

Dari Tabel T-C.25. dapat kita lihat bahwa tujuan dari Bapenda Provinsi Riau adalah tercapainya pendapatan daerah dengan indikator tujuan yaitu angka pendapatan daerah (juta rupiah) dengan target yang telah ditetapkan mulai dari Tahun 2020 (8.736.933), Tahun 2021 (9.183.965), Tahun 2022 (8.656.846), Tahun 2023 (8.226.767) dan Tahun 2024 sebesar (8.647.077). Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Bapenda Provinsi Riau ada 2 (dua).

Pertama yaitu meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah (%) dengan target yang ditetapkan selama 5 tahun kedepan mulai dari Tahun 2020 (44%), Tahun 2021 (54%), Tahun 2022 (54%), sementara pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, menggunakan Indikator Rasio Efektivitas Pendapat Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya dan yang kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik pendapatan Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Score Nilai). Untuk sasaran ini target yang telah ditetapkan selama 5 tahun kedepan yaitu Tahun 2020 (80), Tahun 2021 (80), Tahun 2022 (83), Tahun 2023 (85) dan tahun akhir Renstra PD yaitu Tahun 2024 sebesar (90).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi RPJMD Riau merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Untuk lebih memudahkan pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, maka diperlukan Strategi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, sebagai berikut:

❖ Strategi untuk Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah

1. Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPT/UP, mitra kerja;
2. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Peraturan terbaru dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak;
3. Menggali potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan yang ada dan membuat konsep peraturan baru sebagai dasar pemungutan pajak;
4. Mengevaluasi kembali sistem pengawasan yang ada untuk meningkatkan pengamanan keuangan daerah.

❖ Strategi untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Pendapatan Daerah

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi dan kepatutan;
2. Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
3. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah;
4. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Setelah dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.



Gambar 5.1. Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Riau 2019-2024

Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau secara garis besarnya adalah bagaimana dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan sangat maksimal sehingga dapat mengurangi ketergantungan dengan dana perimbangan yang mana pada tahun yang akan datang dana perimbangan tersebut akan dapat pengurangan Adapun Kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah :

- ❖ Untuk Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah, Kebijakan yang diambil adalah :
 2. Membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Tim Optimalisasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor yang melibatkan mitra kerja : Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Memberikan keringanan denda pajak hingga melakukan penghapusan denda pajak dalam upaya mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak memberikan keringanan denda pajak;

4. Membuat Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman pelaksanaan penagihan dilapangan;
5. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan.

❖ **Untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Pendapatan Daerah, Kebijakan yang diambil adalah :**

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan;
2. Memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penganggaran secara bertahap hingga sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. Memperbaiki Sistem Informasi Teknologi dalam pengelolaan pajak daerah.

Inovasi yang telah dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, adalah :

1. Sistem Informasi Perhitungan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau yang berbasis IT melalui <https://badanpendapatan.riau.go.id/infopajak/>
2. Kolaborasi bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam Implementasi Layanan SAMSAT DIGITAL NASIONAL (SIGNAL) di Provinsi Riau;
3. Memberlakukan Layanan SMS Gate Way;
4. Perancangan dan Pengaplikasian Verifikasi Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berbasis IT;
5. Perancangan dan Pengaplikasian Data Alat Berat/Alat Besar berbasis IT;
6. Perancangan dan Pengaplikasian Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berbasis IT;
7. Perluasan Jangkauan Pelayanan Samsat melalui mobil Samsat Keliling (*Samkel*);
8. Perluasan Pelayanan Samsat melalui Pembukaan Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Pembukaan Penambahan UP baru guna mempermudah pelayanan;
9. Perluasan Jangkauan Pelayanan Samsat melalui penambahan 40 (empat puluh) unit motor melalui Samsat Antar Jemput Antar Kampung (*Samsat Tanjak*) dan Membuat Samsat Drive Thru;

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :		Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera,Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)	
MISI 5 :		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tercapainya Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	1. Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPT/UP, mitra kerja; 2. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Peraturan terbaru dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak; 3. Menggali potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan yang ada dan membuat konsep peraturan baru sebagai dasar pemungutan pajak; 4. Mengevaluasi kembali sistem pengawasan yang ada untuk meningkatkan pengamanan keuangan daerah	1. Membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Tim Optimalisasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor yang melibatkan mitra kerja : Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Memberikan keringanan denda pajak hingga melakukan penghapusan denda pajak dalam upaya mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak memberikan keringanan denda pajak; 3. Membuat Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman pelaksanaan penagihan dilapangan; 4. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan.
	Meningkatnya Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	1. Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPT/UP, mitra kerja; 2. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Peraturan terbaru dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk taat dalam membayar pajak; 3. Menggali potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan yang ada dan membuat konsep peraturan baru sebagai dasar pemungutan pajak; 4. Mengevaluasi kembali sistem pengawasan yang ada untuk meningkatkan pengamanan keuangan daerah.	1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan; 2. Memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penganggaran secara bertahap hingga sesuai dengan standar pelayanan minimal; 3. Memperbaiki Sistem Informasi Teknologi dalam pengelolaan pajak daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sebagai lembaga atau instansi yang mengelola Pendapatan Daerah, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode 2019-2024. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Adapun program-program dalam kerangka pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2019-2024 adalah:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Empat program tersebut dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Riau lima tahun ke depan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome, benefit dan pengaruhnya, sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan Provinsi Riau, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau telah menetapkan Program-Program Strategis dan kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) Program dan 9 (Sembilan) kegiatan, 29 (dua puluh Sembilan) Sub Kegiatan, yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 s/d 2024. Adapun Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel T-C. 27.

Pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk 5 (lima) tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut:

- ❖ Pagu Indikatif Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) Program dengan jumlah pagu sebesar Rp.174.660.88.960,50
- ❖ Pagu Indikatif Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Program dengan jumlah pagu Rp.206.841.421.628,10
- ❖ Pagu Indikatif Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Program dengan jumlah pagu sebesar Rp.194.402.021.145.99.

- ❖ Pagu Indikatif Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Program dengan jumlah pagu sebesar Rp.204.133.581.229.85.
- ❖ Dan untuk Pagu Indikatif Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Program dengan jumlah pagu sebesar Rp.365.279.061.795.56.

Berikut masing-masing Program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada Renstra tahun 2020 s/d 2024 :

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4					5	6	7	8	9	18	19	20	21
Tercapainya Pendapatan Daerah							Belanja Gaji Dan Tunjangan				114,192,190,133.49		91,853,376,803.00		
	1.Meningkatnya Pendpatan Daerah	3	02	1.00	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				16,198,695,326		15,497,087,141		
	2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	3	02	1.00	1.00	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	190 Rekening	1144	4,161,157,600.00	672	3,699,544,107		
		3	02	1.00	1.00	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya Jasa kebersihan untuk kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan dan Rentang waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	12	493,278,170.00	12	476,760,150		
		3	02	1.00	1.00	007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Adanya ATK kantor dan Pelayanan dan Rentang waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	105 Jenis	25	189,577,056.00	25	189,571,250		
		3	02	1.00	1.00	008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan di Kantor Induk dan Rentang waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	70 Jenis	20	2,417,004,500.00	20	2,397,004,500		
		3	02	1.00	1.00	009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan kantor dan Penambahan daya listrik dan Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	43 Jenis	5	20,000,000.00	5	18,057,600		

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4					5	6	7	8	9	18	19	20	21
		3	02	1.00	1.00	010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minum yang disediakan dan Ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu dan pegawai	16000 Porsi	5000	175,000,000.00	4900	165,874,000		
		3	02	1.00	1.00	011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Adanya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1776 Kali	100	889,000,000.00	100	839,594,634		
		3	02	1.00	1.00	012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	jumlah tenaga Keamanan Kantor dan Tersedianya Jasa Keamanan untuk Kantor Induk	1755 OB	354	7,123,864,000.00	1404	7,000,589,000		
		3	02	1.00	1.00	013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	125 OB	25	720,000,000.00	100	701,486,400		
		3	02	1.00	1.00	037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	480 Persen	80	9,814,000.00	78	8,605,500		
		3	02	1.00	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				758,887,700		590,480,390		
		3	02	1.00	2.00	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	650 Unit	10	100,000,000	10	99,165,000		
		3	02	1.00	2.00	014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	778 Unit	162	312,000,000	155	276,830,390		
		3	02	1.00	2.00	016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2750 Unit	550	346,887,700	439	214,485,000		
		3	02	01.2	15.00		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				10,155,713,774		9,343,653,193		
		3	02	01.2	15.00	001.	Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor	Frekuensi Kegiatan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor	100 Kali	9	1,200,000	0	1,200,000		
		3	02	01.2	15.00	002.	Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan	Jumlah Rapat Orientasi Kesamsatan	25 Kali	1	21,000,000	0	0		

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4					5	6	7	8	9	18	19	20	21
		3	02	01.2	15.00	4	Penyusunan Dasar Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) se Provinsi Riau	Jumlah Buku Dasar Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor se Provinsi Riau	228 Buku	228	67,000,000	228	58,421,000		
		3	02	01.2	15.00	6	Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah, PADL dan Pengelolaan Kekayaan Daerah	Jumlah OPD dan Dealer	310 OPD/Dealer	32	22,000,000	32	21,400,000		
		3	02	01.2	15.00	7	Pemutakhiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Frekuensi Pemutakhiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	45 Kali	7	21,930,000	7	20,826,000		
		3	02	01.2	15.00	8	Pembinaan dan Pengawasan Internal secara berkala di UPT/UP pada Provinsi Riau	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan Internal Pada UPT/UP Pengelolaan Pendapatan	385 Kali	66	47,650,000	54	40,285,500		
		3	02	01.2	15.00	9	Rekonsiliasi, Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil	Frekuensi Rekonsiliasi Koordinasi Konsultasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil	81 Kali	3	191,382,000	11	144,995,300		
		3	02	01.2	15.00	11	uji Petik Objek PBB Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan	Frekuensi Optimal Pendapatan Retribusi Daerah	105 Kali	10	39,540,000	8	32,632,500		
		3	02	01.2	15.00	12	Peningkatan Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) di Provinsi Riau	Jumlah Uji Petik Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan	365 Lokasi	48	232,604,900	48	198,840,475		
		3	02	01.2	15.00	13	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Peningkatan Pajak Penerimaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Riau	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi PBB-KB	330 Kali	64	48,242,000	2	20,148,000		
		3	02	01.2	15.00	14	Publikasi Penerimaan PBB, Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah	Frekuensi Publikasi (Baliho, Radio, TV, Standing Banner)	198 Publikasi	137	85,739,800	79	65,700,000		
		3	02	01.2	15.00	16	Optimalisasi Infrastruktur Teknologi Informasi Pengelolaan Pendapatan Provinsi Riau	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perangkat Teknologi Informasi	1675 Unit	36	176,623,400	18	67,944,400		
		3	02	01.2	15.00	17	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	Peningkatan PAD	4374362831529 Rupiah	823,931,000,000.00	417,573,445	714,252,178,005.00	408,113,409		
		3	02	01.2	15.00	18	Penigkatan Pelayanan Pajak UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga	Pendapatan PAD	1821687349117 Rupiah	343,123,000,000.00	170,392,700	210,415,929,980.00	155,012,200		
		3	02	01.2	15.00	19	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura	Peningkatan PAD	85980520422 Rupiah	16,194,800,000.00	300,519,000	17,291,010,111.00	261,603,903		

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4					5	6	7	8	9	18	19	20	21
		3	02	01.2	15.00	20	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis	Peningkatan PAD	118018041737 Rupiah	22,896,100,000.00	348,083,610	21,639,118,088.00	307,851,300		
		3	02	01.2	15.00	21	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Duri	Peningkatan PAD	473401166679 Rupiah	91,842,300,000.00	341,354,700	81,925,289,303.00	339,472,550		
		3	02	01.2	15.00	22	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT Pengelolaan Pendapatan Dumai	Peningkatan PAD	389583329321 Rupiah	75,581,200,000.00	427,358,450	70,544,645,166.00	401,142,100		
		3	02	01.2	15.00	23	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang	Peningkatan PAD	380205682148 Rupiah	65,922,200,000.00	392,878,919	57,524,868,111.00	389,470,398		
		3	02	01.2	15.00	24	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci	Peningkatan PAD	307321362901 Rupiah	59,621,900,000.00	343,623,700	57,928,220,102.00	321,644,600		
		3	02	01.2	15.00	25	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan	Peningkatan PAD	245516605458 Rupiah	47,631,500,000.00	363,081,100	37,477,544,409.00	355,679,332		
		3	02	01.2	15.00	26	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian	Peningkatan PAD	261192416823 Rupiah	50,672,700,000.00	354,212,350	44,869,649,699.00	337,615,950		
		3	02	01.2	15.00	27	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi	Peningkatan PAD	75303138802 Rupiah	14,609,200,000.00	303,989,600	14,803,012,317.00	260,585,918		
		3	02	01.2	15.00	28	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu	Peningkatan PAD	175241746735 Rupiah	33,997,800,000.00	329,526,312	30,662,963,235.00	309,563,265		
		3	02	01.2	15.00	29	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Rengat	Peningkatan PAD	286029387071 Rupiah	55,491,200,000.00	402,971,582	46,683,357,730.00	387,762,893		
		3	02	01.2	15.00	30	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengleolaan Pendapatan Tembilahan	Peningkatan PAD	196569517732 Rupiah	38,135,500,000.00	348,759,150	31,777,498,206.00	326,376,800		
		3	02	01.2	15.00	31	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang	Peningkatan PAD	322992568330 Rupiah	6,992,710,000.00	351,854,150	6,698,660,750.00	322,422,000		
		3	02	01.2	15.00	32	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang	Peningkatan PAD	2280338331 Rupiah	17,915,200,000.00	396,769,800	18,260,794,340.00	378,589,500		
		3	02	01.2	15.00	33	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Perawang	Peningkatan PAD	218479881331 Rupiah	42,386,200,000.00	339,858,739	37,157,136,264.00	330,812,500		

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4					5	6	7	8	9	18	19	20	21
		3	02	01.2	15.00	34	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Rumbai	Peningkatan PAD	90557771899 Rupiah	17,568,700,000.00	343,859,000	17,612,881,703.00	335,017,500		
		3	02	01.2	15.00	35	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Ujung Tanjing	Peningkatan PAD	48985878352 Rupiah	9,503,520,000.00	174,602,499	11,048,470,253.00	165,885,590		
		3	02	01.2	15.00	36	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Air Molek	Peningkatan PAD	58578513738 Rupiah	11,364,500,000.00	191,970,000	12,870,845,967.00	189,980,400		
		3	02	01.2	15.00	37	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kota Baru	Peningkatan PAD	11204344781 Rupiah	2,173,700,000.00	206,147,500	2,441,992,840.00	191,702,650		
		3	02	01.2	15.00	38	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Ujung Batu	Peningkatan PAD	88273080960 Rupiah	17,125,400,000.00	209,455,000	18,647,158,365.00	204,944,500		
		3	02	01.2	15.00	39	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan PangkalKuras	Peningkatan PAD	58391595446 Rupiah	11,328,300,000.00	182,770,228	12,967,924,142.00	179,598,000		
		3	02	01.2	15.00	40	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kandis	Peningkatan PAD	189523924431 Rupiah	9,923,880,000.00	177,891,375	12,059,351,983.00	171,265,000		
		3	02	01.2	15.00	41	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Singingi Hilir	Peningkatan PAD	25194896672 Rupiah	4,887,940,000.00	169,497,875	5,755,684,000.00	164,278,780		
		3	02	01.2	15.00	42	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kuantan Mudik	Peningkatan PAD	18364043782 Rupiah	3,562,720,000.00	184,350,000	2,821,769,460.00	162,612,400		
		3	02	01.2	15.00	44	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Tambusai	Peningkatan PAD	47083026927 Rupiah	9,134,350,000.00	187,572,640	10,842,347,671.00	185,797,780		
		3	02	01.2	15.00	45	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kepenuhan	Peningkatan PAD	21711862039 Rupiah	4,212,210,000.00	196,118,500	4,882,986,297.00	187,924,500		
		3	02	01.2	15.00	46	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kateman	Peningkatan PAD	11186408481 Rupiah	2,170,220,000.00	252,455,000	2,023,901,432.00	230,235,250		
		3	02	01.2	15.00	47	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Kampar Kiri	Peningkatan PAD	23568446502 Rupiah	4,572,400,000.00	167,319,300	6,008,876,400.00	161,248,850		
		3	02	01.2	15.00	48	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam	Peningkatan PAD	51337227147 Rupiah	9,959,690,000.00	299,319,250	34,821,509,000.00	286,716,450		

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										2020		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp.	target	Rp.		
1	2	4					5	6	7	8	9	18	19	20	21
		3	02	01.2	15.00	49	Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pengelolaan Pendapatan Samsat Keliling	Peningkatan PAD	209017058361 Rupiah	30,001,800,000.00	179,669,000	6,828,701,222.00	133,580,250		
		3	02	01.2	15.00	50	Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pengelolaan Pendapatan Tapung	Peningkatan PAD	Rupiah	16,693,700,000.00	144,997,200	18,979,358,553.00	126,753,500		
		TOTAL									141,305,486,933		117,284,597,527		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 - 2024

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
												177,779,498,056		175,539,047,355		175,416,017,880		178,470,366,734		528,734,563,291		
																				-		
																				-		
Tercapainya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah		100	155,934,489,487	100	154,922,730,473	100	154,707,745,212	100	157,193,261,910	100	465,564,965,172		
		5	02	01	101			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	6	200,000,000	6	250,000,000	12	200,000,000		
		5	02	01	101	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6	200,000,000	6	250,000,000	12	200,000,000		
		5	02	01	102			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi		440	126,965,078,614	440	127,721,406,755	440	130,275,834,890	440	132,881,351,588	1,760	384,962,320,259		
		5	02	01	102	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440												
											440	126,965,078,614	440	127,721,406,755	440	130,275,834,890	440	132,881,351,588	1,760	384,962,320,699		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola		-	-	-	-	1	25,000,000	1	25,000,000	2	25,000,000		
		5	02	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1	25,000,000	1	25,000,000	2	25,000,000		
		5	02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		2,879	4,411,482,250	421	5,911,332,246	509	4,870,000,000	509	5,000,000,000	4,318	15,192,814,496		
		5	02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	5	65,794,862	1	65,794,862	1	70,000,000	1	70,000,000	8	201,589,749		
	5	5	02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	20	3,127,985,488	3	1,190,901,364	3	300,000,000	3	350,000,000	29	4,618,886,952		
		5	02	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500	2,500	238,500,900	1	246,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	2,503	734,503,400		
		5	02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70	14	246,100,000	3	3,502,637,020	3	3,300,000,000	3	3,300,000,000	23	7,048,737,090		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10					1	30,000,000	1	30,000,000	2	30,000,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2500	340	733,101,000	413	905,999,000	500	920,000,000	500	1,000,000,000	1,753	2,559,102,500		
		5	02	01	107			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		566	7,847,997,808	26	4,604,726,908	22	2,700,000,000	21	2,100,000,000	95	15,152,724,716		
		5	02	01	107	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						2	1,200,000,000	1	600,000,000	3	1,200,000,000		
		5	02	01	107	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	10	964,143,125	10	492,967,440	10	500,000,000	10	500,000,000	40	1,957,110,615		
		5	02	01	107	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	6	3,389,652,656	6	3,000,000,000					12	6,389,652,671		
		5	02	01	107	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	550	3,494,202,027	10	1,111,759,468	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	40	5,605,961,545		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		82,077	14,001,278,608	3,026	14,200,614,564	3,026	15,611,910,322	3,026	15,911,910,322	91,155	43,813,803,494		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10000	70,000	22,760,000	2,276	26,000,000	2,276	25,000,000	2,276	25,000,000	76,828	73,770,000		
		5	02	01	108	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50000	11,400	5,424,910,576	50	5,424,910,020	50	6,386,910,322	50	6,386,910,322	11,550	17,236,780,918		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3000	677	8,553,608,032	700	8,749,704,544	700	9,200,000,000	700	9,500,000,000	2,777	26,503,315,576		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		265	2,708,652,207	266	2,484,650,000	262	1,000,000,000	262	1,000,000,000	1,055	6,193,302,207		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	800	162	497,250,000	162	497,250,000	162	500,000,000	162	500,000,000	648	1,494,500,800		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500	100	1,723,362,207	100	487,400,000	100	500,000,000	100	500,000,000	400	2,710,762,707		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	3	488,040,000	4	1,500,000,000					7	1,988,040,010		
		5	02	01	104			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Nilai Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah		17,215		37,256	-	59,119	25,000,000	62,075	25,000,000	175,665	25,000,000		
		5	02	01	104	04		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah						1	25,000,000	1	25,000,000		25,000,000		
		5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat kepatuhan laporan keuangan		100	517,541,000	100	720,895,544	100	526,889,000	100	526,889,000	100	1,765,325,544		
		5	02	02	103			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100	485,381,000	100	527,557,000	100	526,889,000	100	526,889,000	100	1,539,827,000		
		5	02	02	103	05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50	12	485,381,000	12	527,557,000	12	526,889,000	12	526,889,000	48	1,539,827,050		
		5	02	02	104			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi LHP		100	32,160,000	100	193,338,544	-	-	-	-	100	225,498,544		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	02	104	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	13	2	32,160,000	3	193,338,544					5	225,498,557		
		3210	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola		100	68,537,500	100	321,000,000	-	-	-	-	100	389,537,500		
		5	02	03	101		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola		100	68,537,500	100	321,000,000	-	-	-	-	100	389,537,500		
		5	02	03	101	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50	100	68,537,500	12	321,000,000					112	389,537,550		
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Pendapatan Asli Daerah 2. Persentase tingkat Pelayanan Publik Pengelolaan Pendapatan yang terpenuhi		1. 9183690 2. 85 %	8,362,707,892	1. 8085899 2. 80 %	5,914,439,833	1. 8314646 2. 85 %	4,978,219,290	1. 8647077 2. 85 %	4,978,219,290	1. 8647077 2. 83,75 %	19,255,367,015		
		5	02	04	101		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah		93	8,362,707,892	74	5,914,439,833	83	4,978,219,290	83	4,978,219,290	333	19,255,367,015		
		5	02	04	101	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	541,615,000		-					1	541,615,001		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	04	101	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	3	704,756,768		-	1	25,000,000	1	25,000,000	5	729,756,771		
		5	02	04	101	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	3	290,308,576	2	862,704,401	2	787,413,170	2	787,413,170	9	1,940,426,157		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	5	02	04	101	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						1	580,000,000	1	580,000,000	2	580,000,000		
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	5	02	04	101	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						1	580,000,000	1	580,000,000	2	580,000,000		
		5	02	04	101	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10	17	5,208,222,574	3	1,699,880,040	1	350,000,000	1	350,000,000	22	7,258,102,624		
		5	02	04	101	07		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah						1	25,000,000	1	25,000,000	2	25,000,000		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	5	02	04	101	08		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.						1	25,000,000	1	25,000,000	2	25,000,000		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	04	101	09		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2	2	384,603,032	2	608,091,032	2	419,422,000	2	419,422,000	8	1,412,116,066		
		5	02	04	101	10		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	25	25	352,865,000	25	493,133,000	25	491,384,120	25	491,384,120	100	1,337,382,145		
		5	02	04	101	11		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti						5	25,000,000	5	25,000,000	10	25,000,000		
		5	02	04	101	12		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50	12	722,326,942	12	2,035,286,360	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	48	4,757,613,352		
		5	02	04	101	13		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	150	30	158,010,000	30	215,345,000	30	200,000,000	30	200,000,000	120	573,355,150		
		5	02	04	101	14		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						1	25,000,000	1	25,000,000	2	25,000,000		
												12,896,222,177		13,659,981,505		15,203,164,378		15,771,996,534		41,759,368,060		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah		100	749,774,237	100	782,371,900	100	789,909,768	100	798,364,818	3,556	2,322,055,905		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi		100	241,964,237	525	271,932,812	525	313,745,000	525	322,107,350	2,092	827,642,049		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	18			6	5,000,000	6	5,150,000	6	5,304,500	18	10,150,018		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	71,514,237	25	30,432,812	25	35,000,000	25	35,000,000	100	136,947,174		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2000	400	23,000,000	400	23,000,000	400	23,690,000	400	24,400,700	1,600	69,692,000		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	21,900,000	2	21,900,000	2	22,557,000	2	23,233,710	8	66,357,010		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6			2	6,000,000	2	6,180,000	2	6,365,400	6	12,180,006		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	450	90	125,550,000	90	185,600,000	90	221,168,000	90	227,803,040	360	532,318,450		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	430,920,000	363	433,549,088	363	432,834,768	363	432,927,468	1,452	1,297,303,956		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	3,000,000	360	3,000,000	360	3,090,000	360	3,182,700	1,440	9,091,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	427,920,000	3	430,549,088	3	429,744,768	3	429,744,768	12	1,288,213,871		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	76,890,000	4	76,890,000	3	43,330,000	3	43,330,000	12	197,110,100		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	33,560,000	1	33,560,000	1	33,560,000	1	33,560,000	106	100,680,005		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	43,330,000	3	43,330,000	3	43,330,000	3	43,330,000	12	129,990,015		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	899,875,726	100	1,000,182,421	100	913,074,972	100	918,574,972	3,558	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	389,175,726	525	487,882,421	525	467,895,000	525	473,395,000	2,094	1,344,953,247		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	18			6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,500,000	18	10,000,018		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	104,400,726	25	39,332,421	25	85,000,000	25	90,000,000	100	228,733,272		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2000	400	32,200,000	400	32,200,000	400	32,200,000	400	32,200,000	1,600	96,602,000		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	14,600,000	2	14,600,000	2	14,600,000	2	14,600,000	8	43,800,010		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	0	2	10,500,000	2	10,500,000	2	10,500,000	2	10,500,000	8	31,500,000		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	450	90	227,475,000	90	386,250,000	90	320,595,000	90	320,595,000	360	934,320,450		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	421,900,000	363	423,500,000	363	423,499,972	363	423,499,972	1,452	1,268,900,072		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	2,220,000	360	2,220,000	360	2,220,000	360	2,220,000	1,440	6,661,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	419,680,000	3	421,280,000	3	421,279,972	3	421,279,972	12	1,262,239,987		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	88,800,000	4	88,800,000	3	21,680,000	3	21,680,000	12	199,280,100		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	67,120,000	1	67,120,000	1	67,120,000	1	67,120,000	4	201,360,005		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	21,680,000	3	21,680,000	3	21,680,000	3	21,680,000	12	65,040,015		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	989,928,452	100	1,075,666,872	100	1,843,943,624	100	1,893,049,337	2,796	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	365,648,452	525	389,726,872	525	1,045,840,424	525	1,092,069,337	1,692	1,801,215,848		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	18			6	5,000,000	6	6,600,000	6	7,200,000	18	11,600,018		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	109,678,452	25	32,766,967	25	182,407,924	25	220,713,587	100	324,853,468		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2000		27,000,000	400	16,100,000	400	29,700,000	400	32,670,000	1,200	72,802,000		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	18,250,000	2	9,999,905	2	32,972,500	2	36,269,750	8	61,222,415		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	0		6,000,000	2	6,000,000	2	10,560,000	2	11,616,000	6	22,560,000		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	450	90	204,720,000	90	319,860,000	90	783,600,000	90	783,600,000	360	1,308,180,450		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	557,280,000	363	615,200,000	363	759,480,000	363	760,480,000	1,092	1,931,960,100		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800			360	2,000,000	360	3,000,000	360	4,000,000	1,080	5,001,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	557,280,000	3	613,200,000	3	756,480,000	3	756,480,000	12	1,926,960,015		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	67,000,000	4	70,740,000	3	38,623,200	3	40,500,000	12	176,363,300		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	33,560,000	1	40,900,000	1	44,990,000	1	49,849,000	4	119,450,005		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	33,440,000	3	29,840,000	3	38,623,200	3	40,500,000	12	101,903,215		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	564,793,971	100	540,981,254	100	512,696,254	100	517,696,254	3,560	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	175,433,971	524	160,960,534	524	166,235,534	524	171,235,534	2,096	502,630,139		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30	6	22,400,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	24	32,400,030		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	65,733,971	25	45,875,779	25	45,875,779	25	45,875,779	100	157,485,654		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2000	400	53,040,000	400	52,900,000	400	52,900,000	400	52,900,000	1,600	158,842,000		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	9,960,000	2	9,959,755	2	9,959,755	2	9,959,755	8	29,879,520		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	0	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	4	22,500,000		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	450	90	16,800,000	90	39,725,000	90	45,000,000	90	50,000,000	360	101,525,450		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	329,000,000	363	319,710,720	363	319,710,720	363	319,710,720	1,452	968,421,540		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	1,200,000	360	1,200,000	360	1,200,000	360	1,200,000	1,440	3,601,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	327,800,000	3	318,510,720	3	318,510,720	3	318,510,720	12	964,821,455		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	60,360,000	4	60,310,000	3	26,750,000	3	26,750,000	12	147,420,100		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	33,560,000	1	33,560,000	1	33,560,000	1	33,560,000	4	100,680,005		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	26,800,000	3	26,750,000	3	26,750,000	3	26,750,000	12	80,300,015		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	386,421,826	100	362,518,955	100	294,486,602	100	341,703,922	6,784	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	170,802,826	1,359	147,359,755	1,359	175,526,602	1,359	209,291,922	5,416	493,689,283		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	20 unit			20	5,000,000	20	6,000,000	20	7,200,000	60	#VALUE!		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	14 jenis	14	60,075,896	14	49,600,000	14	59,514,896	14	71,417,875	56	#VALUE!		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1040 porsi	1,040	44,260,000	1,040	52,900,000	1,040	63,480,000	1,040	76,176,000	4,160	#VALUE!		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 jenis	3	42,366,930	3	9,959,755	3	11,951,706	3	14,342,047	12	#VALUE!		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2 jenis	2	7,300,000	2	7,500,000	2	7,700,000	2	7,900,000	8	#VALUE!		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	280 kali	280	16,800,000	280	22,400,000	280	26,880,000	280	32,256,000	1,120	#VALUE!		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	52,320,000	302	52,579,200	302	53,200,000	302	53,500,000	1,208	158,099,300		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	300 surat	300	4,320,000	300	4,320,000	300	5,200,000	300	5,500,000	1,200	#VALUE!		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2 orang	2	48,000,000	2	48,259,200	2	48,000,000	2	48,000,000	8	#VALUE!		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	163,299,000	43	162,580,000	40	65,760,000	40	78,912,000	160	391,639,100		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3 unit	3	129,799,000	3	107,780,000	3	129,336,000	3	155,203,200	12	#VALUE!		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	40 unit	40	33,500,000	40	54,800,000	40	65,760,000	40	78,912,000	160	#VALUE!		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	546,164,275	100	568,540,017	100	722,223,023	100	975,001,081	6,804	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	229,814,275	1,359	254,635,489	1,359	343,757,910	1,359	464,073,179	5,436	828,207,774		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	20	4,480,000	20	4,480,000	20	6,048,000	20	8,164,800	80	15,008,100		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	70	14	39,100,000	14	27,039,834	14	36,503,776	14	49,280,097	56	102,643,680		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5200	1,040	7,499,880	1,040	14,996,000	1,040	20,244,600	1,040	27,330,210	4,160	42,745,680		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	115,800,000	3	7,499,655	3	10,124,534	3	13,668,121	12	133,424,204		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	52,334,395	2	10,600,000	2	14,310,000	2	19,318,500	8	77,244,405		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1400	280	10,600,000	280	190,020,000	280	256,527,000	280	346,311,450	1,120	457,148,400		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	238,620,000	302	239,874,528	302	323,830,613	302	437,171,327	1,208	802,325,241		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1500	300	6,300,000	300	6,300,000	300	8,505,000	300	11,481,750	1,200	21,106,500		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	232,320,000	2	233,574,528	2	315,325,613	2	425,689,577	8	781,220,151		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	77,730,000	43	74,030,000	40	54,634,500	40	73,756,575	160	206,394,600		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	36,210,000	3	33,560,000	3	45,306,000	3	61,163,100	12	115,076,015		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	200	40	41,520,000	40	40,470,000	40	54,634,500	40	73,756,575	160	136,624,700		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	1,263,078,026	100	1,280,554,696	100	1,164,168,184	100	1,164,168,184	174,982	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	522,278,026	42,157	539,988,184	42,157	479,728,184	42,157	479,728,184	168,622	1,541,994,494		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	18			6	7,280,000	6	7,280,000	6	7,280,000	18	14,560,018		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	70	14	28,260,000	14	100,978,184	14	100,978,184	14	100,978,184	56	230,216,438		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2000	400	14,600,000	400	28,260,000	400	12,000,000	400	12,000,000	1,600	54,862,000		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	200000	40,000	8,000,000	40,000	14,600,000	40,000	14,600,000	40,000	14,600,000	160,000	37,400,000		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	8000	1,600	273,990,000	1,600	8,000,000	1,600	3,000,000	1,600	3,000,000	6,400	284,998,000		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	685	137	197,428,026	137	380,870,000	137	341,870,000	137	341,870,000	548	920,168,711		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	603,920,000	1,544	606,216,512	1,544	635,560,000	1,544	635,560,000	6,176	1,845,696,612		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	7620	1,524	7,640,000	1,524	7,640,000	1,524	7,640,000	1,524	7,640,000	6,096	22,927,620		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	20	596,280,000	20	598,576,512	20	627,920,000	20	627,920,000	80	1,822,776,612		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	136,880,000	48	134,350,000	46	48,880,000	46	48,880,000	184	320,110,100		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	85,470,000	2	85,470,000	2	85,470,000	2	85,470,000	8	256,410,010		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	230	46	51,410,000	46	48,880,000	46	48,880,000	46	48,880,000	184	149,170,230		
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	541,296,564	100	549,805,158	100	515,271,080	100	525,271,080	174,988	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	232,703,564	42,157	260,004,678	42,157	270,040,600	42,157	280,040,600	168,628	762,748,942		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30	6	3,790,000	6	3,780,000	6	3,855,600	6	3,855,600	24	11,425,630		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	70	14	54,218,684	14	45,919,023	14	46,000,000	14	46,000,000	56	146,137,777		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2000	400	29,900,000	400	14,996,000	400	15,000,000	400	15,000,000	1,600	59,898,000		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	200000	40,000	7,499,880	40,000	7,499,655	40,000	76,000,000	40,000	76,000,000	160,000	91,199,535		
		5	02	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	8000	1,600	9,185,000	1,600	9,185,000	1,600	9,185,000	1,600	9,185,000	6,400	27,563,000		
		5	02	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	685	137	128,110,000	137	178,625,000	137	120,000,000	137	130,000,000	548	426,735,685		
		5	02	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	214,200,000	1,544	217,340,480	1,544	217,340,480	1,544	217,340,480	6,176	648,881,060		
		5	02	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	7620	1,524	3,000,000	1,524	5,000,000	1,524	5,000,000	1,524	5,000,000	6,096	13,007,620		
		5	02	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	20	211,200,000	20	212,340,480	20	212,340,480	20	212,340,480	80	635,881,060		
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	94,393,000	48	72,460,000	46	27,890,000	46	27,890,000	184	194,743,100		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	44,570,000	2	44,570,000	2	44,570,000	2	44,570,000	8	133,710,010		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	230	46	49,823,000	46	27,890,000	46	27,890,000	46	27,890,000	184	105,603,230		
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	432,591,396	100	438,512,087	100	433,036,919	100	476,340,610	174,982	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	183,221,396	42,157	163,605,655	42,157	179,666,843	42,157	197,633,528	168,622	526,493,994		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	18			6	5,000,000	6	5,500,000	6	6,050,000	18	10,500,018		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	70	14	54,406,516	14	24,160,000	14	26,573,623	14	29,230,985	56	105,140,209		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	2000	400	25,300,000	400	14,996,000	400	16,495,600	400	18,145,160	1,600	56,793,600		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	200000	40,000	7,499,880	40,000	7,499,655	40,000	8,249,621	40,000	9,074,583	160,000	23,449,156		
		5	02	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	8000	1,600	5,120,000	1,600	5,120,000	1,600	5,632,000	1,600	6,195,200	6,400	15,880,000		
		5	02	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	685	137	90,895,000	137	106,830,000	137	117,216,000	137	128,937,600	548	314,941,685		
		5	02	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	191,750,000	1,544	193,306,432	1,544	212,637,075	1,544	233,900,783	6,176	597,693,607		
		5	02	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	7620	1,524	1,670,000	1,524	2,200,000	1,524	2,420,000	1,524	2,662,000	6,096	6,297,620		
		5	02	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	20	190,080,000	20	191,106,432	20	210,217,075	20	231,238,783	80	591,403,607		
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	57,620,000	48	81,600,000	46	40,733,000	46	44,806,300	184	179,953,100		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	48,240,000	2	44,570,000	2	49,027,000	2	53,929,700	8	141,837,010		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	230	46	9,380,000	46	37,030,000	46	40,733,000	46	44,806,300	184	87,143,230		
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	889,423,719	100	969,794,768	100	1,045,773,758	100	1,059,103,758	317,624	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	377,143,719	78,598	386,300,000	78,598	457,491,758	78,598	470,821,758	314,392	1,220,935,577		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	32	8	11,040,000	8	11,000,000	8	11,000,000	8	11,000,000	32	33,040,032		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	182	40	110,633,719	40	50,560,000	40	121,631,758	40	121,631,758	160	282,825,659		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6300	1,500	39,100,000	1,500	39,100,000	1,500	26,910,000	1,500	39,100,000	6,000	105,116,300		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	357600	75,000	18,250,000	75,000	18,250,000	75,000	32,000,000	75,000	32,000,000	300,000	68,857,600		
		5	02	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	8250	1,850	6,750,000	1,850	6,750,000	1,850	6,750,000	1,850	6,750,000	7,400	20,258,250		
		5	02	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	880	200	191,370,000	200	260,640,000	200	259,200,000	200	260,340,000	800	711,210,880		
		5	02	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	445,920,000	803	497,744,768	803	548,112,000	803	548,112,000	3,212	1,491,776,868		
		5	02	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3600	800	6,000,000	800	6,000,000	800	7,000,000	800	7,000,000	3,200	19,003,600		
		5	02	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	439,920,000	3	491,744,768	3	541,112,000	3	541,112,000	12	1,472,776,783		
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	66,360,000	12	85,750,000	5	40,170,000	5	40,170,000	20	192,280,100		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	35	7	55,580,000	7	55,580,000	7	57,941,000	7	57,941,000	28	169,101,035		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	25	5	10,780,000	5	30,170,000	5	40,170,000	5	40,170,000	20	81,120,025		
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	970,014,748	100	1,104,352,854	100	1,092,626,365	100	1,092,626,365	4,932	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	421,514,748	867	451,459,990	867	491,643,501	867	491,643,501	3,468	1,364,618,339		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30	6	7,850,000	6	10,250,000	6	10,250,000	6	10,250,000	24	28,350,030		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	118,924,748	25	47,840,000	25	47,833,511	25	47,833,511	100	214,598,384		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	55,200,000	700	33,120,000	700	33,120,000	700	33,120,000	2,800	121,443,500		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	21,900,000	2	47,349,990	2	47,349,990	2	47,349,990	8	116,599,990		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	10,500,000	2	11,220,000	2	11,220,000	2	11,220,000	8	32,940,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	207,140,000	132	301,680,000	132	341,870,000	132	341,870,000	528	850,690,660		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	487,160,000	363	526,212,864	363	526,212,864	363	526,212,864	1,452	1,539,585,828		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	7,000,000	360	9,000,000	360	9,000,000	360	9,000,000	1,440	25,001,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	480,160,000	3	517,212,864	3	517,212,864	3	517,212,864	12	1,514,585,743		
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	61,340,000	4	126,680,000	3	74,770,000	3	74,770,000	12	262,790,100		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	33,560,000	1	51,910,000	1	51,910,000	1	51,910,000	4	137,380,005		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	27,780,000	3	74,770,000	3	74,770,000	3	74,770,000	12	177,320,015		
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	459,167,407	100	479,418,202	100	659,089,122	100	659,089,122	4,566	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	222,747,407	867	230,991,770	867	430,403,190	867	430,403,190	3,462	884,146,702		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30			6	990,000	6	4,390,890	6	4,390,890	18	5,380,920		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	46,077,443	25	29,920,000	25	58,452,450	25	58,452,450	100	134,450,018		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	42,780,000	700	9,982,000	700	10,481,100	700	10,481,100	2,800	63,246,600		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	2,249,964	2	4,999,770	2	5,748,750	2	5,748,750	8	12,998,494		
		5	02	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	3,600,000	2	10,500,000	2	10,500,000	2	10,500,000	8	24,600,010		
		5	02	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	128,040,000	132	174,600,000	132	340,830,000	132	340,830,000	528	643,470,660		
		5	02	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	190,080,000	363	196,106,432	363	192,681,432	363	192,681,432	1,092	578,867,964		
		5	02	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800			360	5,000,000	360	1,575,000	360	1,575,000	1,080	6,576,800		
		5	02	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	190,080,000	3	191,106,432	3	191,106,432	3	191,106,432	12	572,292,879		
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	46,340,000	4	52,320,000	3	36,004,500	3	36,004,500	12	134,664,600		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	40,900,000	1	33,560,000	1	46,798,500	1	46,798,500	4	121,258,505		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	5,440,000	3	18,760,000	3	36,004,500	3	36,004,500	12	60,204,515		
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	527,130,813	100	633,219,528	100	641,520,164	100	651,520,164	4,932	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	225,870,813	867	281,895,000	867	314,775,836	867	324,775,836	3,468	822,541,749		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30	6	6,640,000	6	5,600,000	6	5,600,000	6	5,600,000	24	17,840,030		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	65,795,813	25	35,680,000	25	35,675,836	25	35,675,836	100	137,151,774		
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	29,900,000	700	29,900,000	700	29,900,000	700	29,900,000	2,800	89,703,500		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	12,775,000	2	12,775,000	2	12,775,000	2	12,775,000	8	38,325,010		
		5	02	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	10,500,000	2	10,500,000	2	10,500,000	2	10,500,000	8	31,500,010		
		5	02	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	100,260,000	132	187,440,000	132	220,325,000	132	230,325,000	528	508,025,660		
		5	02	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	234,320,000	363	285,574,528	363	301,894,328	363	301,894,328	1,452	821,788,956		
		5	02	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	2,000,000	360	2,000,000	360	2,000,000	360	2,000,000	1,440	6,001,800		
		5	02	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	232,320,000	3	283,574,528	3	299,894,328	3	299,894,328	12	815,788,871		
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	66,940,000	4	65,750,000	3	24,850,000	3	24,850,000	12	157,540,100		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	40,900,000	1	40,900,000	1	40,900,000	1	40,900,000	4	122,700,005		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	26,040,000	3	24,850,000	3	24,850,000	3	24,850,000	12	75,740,015		
		5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	708,196,957	100	733,383,528	100	888,235,157	100	922,965,157	4,926	#VALUE!		
		5	02	01	106			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	285,360,057	867	337,339,000	867	438,565,157	867	438,565,157	3,462	1,061,264,314		
		5	02	01	106	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30			6	7,280,000	6	7,280,000	6	7,280,000	18	14,560,030		
		5	02	01	106	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	87,390,157	25	47,360,000	25	87,390,157	25	87,390,157	100	222,140,439		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	36,800,000	700	25,944,000	700	36,800,000	700	36,800,000	2,800	99,547,500		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	6,249,900	2	12,775,000	2	12,775,000	2	12,775,000	8	31,799,910		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	5,400,000	2	8,000,000	2	8,000,000	2	8,000,000	8	21,400,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	149,520,000	132	235,980,000	132	286,320,000	132	286,320,000	528	671,820,660		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	336,056,900	363	312,074,528	363	406,600,000	363	447,750,000	1,452	1,054,731,528		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	28,736,900	360	3,500,000	360	34,750,000	360	38,250,000	1,440	66,988,700		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	307,320,000	3	308,574,528	3	371,850,000	3	409,500,000	12	987,744,543		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	86,780,000	4	83,970,000	3	43,070,000	3	36,650,000	12	213,820,100		
		5	02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	43,550,000	1	40,900,000	1	43,550,000	1	43,550,000	4	128,000,005		
		5	02	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	43,230,000	3	43,070,000	3	43,070,000	3	36,650,000	12	129,370,015		
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	883,507,745	100	894,511,791	100	1,195,653,090	100	1,195,653,090	4,924	#VALUE!		
		5	02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	306,267,745	867	324,053,775	867	495,153,090	867	495,153,090	3,460	1,125,474,710		
		5	02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30			6	5,175,000	6	4,800,000	6	4,800,000	18	9,975,030		
		5	02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	27,000,000	25	55,040,000	25	151,793,090	25	151,793,090	100	233,833,215		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	16,425,000	700	25,944,000	700	18,400,000	700	18,400,000	2,800	60,772,500		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	159,365,000	2	11,619,775	2	16,425,000	2	16,425,000	8	187,409,785		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10			2	8,000,000	2	12,530,000	2	12,530,000	6	20,530,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	103,477,745	132	218,275,000	132	291,205,000	132	291,205,000	528	612,958,405		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	469,420,000	363	462,738,016	363	628,900,000	363	628,900,000	1,452	1,561,058,116		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	2,500,000	360	3,500,000	360	3,500,000	360	3,500,000	1,440	9,501,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	466,920,000	3	459,238,016	3	625,400,000	3	625,400,000	12	1,551,558,031		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	107,820,000	4	107,720,000	3	71,600,000	3	71,600,000	12	287,140,100		
		5	02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	74,460,000	1	74,460,000	1	98,120,000	1	98,120,000	4	247,040,005		
		5	02	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	33,360,000	3	33,260,000	3	71,600,000	3	71,600,000	12	138,220,015		
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	463,174,610	100	451,776,237	100	481,671,610	100	495,603,610	4,566	#VALUE!		
		5	02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	90,984,610	867	76,899,805	867	122,091,610	867	125,523,610	3,462	289,976,125		
		5	02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30			6	1,400,000	6	3,500,000	6	4,000,000	18	4,900,030		
		5	02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	49,329,754	25	29,280,000	25	49,329,754	25	49,329,754	100	127,939,633		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700		700	2,990,000	700	5,400,000	700	5,000,000	2,800	8,393,500		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	8,999,856	2	8,999,805	2	9,331,856	2	9,663,856	8	27,331,527		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	12,530,000	2	12,530,000	2	12,530,000	2	12,530,000	8	37,590,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	20,125,000	132	21,700,000	132	42,000,000	132	45,000,000	528	83,825,660		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	325,080,000	363	328,106,432	363	347,080,000	363	357,080,000	1,092	1,000,266,532		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800			360	2,000,000	360	2,000,000	360	2,000,000	1,080	4,001,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	325,080,000	3	326,106,432	3	345,080,000	3	355,080,000	12	996,266,447		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	47,110,000	4	46,770,000	3	12,500,000	3	13,000,000	12	106,380,100		
		5	02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	37,230,000	1	37,230,000	1	37,230,000	1	37,230,000	4	111,690,005		
		5	02	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	9,880,000	3	9,540,000	3	12,500,000	3	13,000,000	12	31,920,015		
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	522,614,765	100	606,963,576	100	586,457,711	100	596,382,711	4,926	2,321,418,763		
		5	02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	224,564,765	867	247,915,000	867	253,799,335	867	263,724,335	3,464	726,279,200		
		5	02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30	6	15,600,000	6	11,550,000	6	11,550,000	6	11,550,000	24	38,700,030		
		5	02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	70784765	25	28,640,000	25	28,639,335	25	28,639,335	100	128,064,225		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	27,600,000	700	11,960,000	700	11,960,000	700	11,960,000	2,800	51,523,500		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10			2	13,505,000	2	13,505,000	2	13,505,000	6	27,010,010		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10			2	7,660,000	2	7,660,000	2	7,660,000	6	15,320,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	110,580,000	132	174,600,000	132	180,485,000	132	190,410,000	528	465,665,660		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	254,880,000	363	307,808,576	363	307,808,376	363	307,808,376	1,452	870,497,052		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	1,440,000	360	3,000,000	360	3,000,000	360	3,000,000	1,440	7,441,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	253,440,000	3	304,808,576	3	304,808,376	3	304,808,376	12	863,056,967		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	43,170,000	4	51,240,000	3	24,850,000	3	24,850,000	10	119,260,100		
		5	02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5			1	37,230,000	1	40,900,000	1	40,900,000	3	78,130,005		
		5	02	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	1	43,170,000	3	14,010,000	3	24,850,000	3	24,850,000	10	82,030,015		
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	440,133,086	100	422,489,935	100	526,812,250	100	541,185,586	4,926	#VALUE!		
		5	02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	77,613,086	867	59,323,503	867	157,262,250	867	166,885,586	3,462	294,198,939		
		5	02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30			6	990,000	6	1,750,000	6	2,250,000	18	2,740,030		
		5	02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	39,738,230	25	19,719,798	25	89,215,250	25	92,761,586	100	148,673,403		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	27,600,000	700	25,714,000	700	49,680,000	700	52,000,000	2,800	102,997,500		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	699,856	2	699,705	2	1,992,000	2	2,324,000	8	3,391,571		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,500,000	2	2,500,000	8	3,500,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	8,575,000	132	11,200,000	132	13,125,000	132	15,050,000	528	32,900,660		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	318,920,000	363	320,106,432	363	344,700,000	363	349,450,000	1,452	983,726,532		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	840,000	360	1,000,000	360	1,500,000	360	2,250,000	1,440	3,341,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	318,080,000	3	319,106,432	3	343,200,000	3	347,200,000	12	980,386,447		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	100	43,600,000	4	43,060,000	3	24,850,000	3	24,850,000	12	111,510,100		
		5	02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	36,700,000	1	33,560,000	1	40,900,000	1	40,900,000	4	111,160,005		
		5	02	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	6,900,000	3	9,500,000	3	24,850,000	3	24,850,000	12	41,250,015		
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	6 Jenis Layanan	100	298,908,614	100	397,826,830	100	485,612,078	100	534,173,286	4,228	#VALUE!		
		5	02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	163	77,248,614	867	118,504,446	867	99,041,278	867	108,945,406	2,764	294,794,438		
		5	02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30	6	5,017,000	6	2,310,000	6	6,437,200	6	7,080,920	24	13,764,230		
		5	02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	37,251,614	25	21,471,676	25	48,015,723	25	52,817,296	100	106,739,138		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500			700	9,982,000	700	19,481,000	700	21,429,100	2,100	29,466,500		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10			2	4,780,770	2	9,074,855	2	9,982,340	6	13,855,635		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10			2	10,000,000	2	3,327,500	2	3,660,250	6	13,327,510		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	34,980,000	132	69,960,000	132	12,705,000	132	13,975,500	528	117,645,660		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	363	221,660,000	363	221,872,384	363	328,442,400	363	361,286,640	1,452	771,974,884		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	2,700,000	360	2,000,000	360	4,356,000	360	4,791,600	1,440	9,057,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	218,960,000	3	219,872,384	3	324,086,400	3	356,495,040	12	762,918,799		

Tujuan	Sasaran	KODE					Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	-	-	4	57,450,000	4	58,128,400	4	63,941,240	12	115,578,420		
		5	02	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5			1	37,230,000	1	44,407,000	1	48,847,700	3	81,637,005		
		5	02	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15			3	20,220,000	3	13,721,400	3	15,093,540	9	33,941,415		
		5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pendapatan daerah	2 Jenis Layanan	100	360,025,240	100	367,110,896	100	410,902,647	100	413,523,427	4,932	#VALUE!		
		5	02	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	867	73,575,240	867	75,732,560	867	111,822,647	867	114,443,427	3,468	261,130,547		
		5	02	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	30	6	980,000	6	980,000	6	3,893,400	6	4,010,202	24	5,853,430		
		5	02	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	125	25	35,745,360	25	6,799,560	25	54,299,247	25	55,928,225	100	96,844,292		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	106	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	3500	700	16,100,000	700	15,318,000	700	16,100,000	700	16,100,000	2,800	47,521,500		
		5	02	01	106	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	7,499,880	2	19,710,000	2	8,030,000	2	8,030,000	8	35,239,890		
		5	02	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	10	2	2,750,000	2	10,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	8	17,750,010		
		5	02	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	660	132	10,500,000	132	22,925,000	132	24,500,000	132	25,375,000	528	57,925,660		
		5	02	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	363	271,440,000	363	269,638,336	363	272,840,000	363	272,840,000	1,452	813,918,436		
		5	02	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	1800	360	3,600,000	360	1,000,000	360	5,000,000	360	5,000,000	1,440	9,601,800		
		5	02	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	267,840,000	3	268,638,336	3	267,840,000	3	267,840,000	12	804,318,351		

Tujuan	Sasaran	KODE						Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		5	02	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	100	4	15,010,000	4	21,740,000	3	26,240,000	3	26,240,000	12	62,990,100		
		5	02	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	5	1	3,670,000	1	3,670,000	1	44,570,000	1	44,570,000	4	51,910,005		
		5	02	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	15	3	11,340,000	3	18,070,000	3	26,240,000	3	26,240,000	12	55,650,015		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah dan Akuntabel. Untuk itu pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan, sehingga tidak menimbulkan biaya yang berlebihan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan target Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ke depan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Badan Pendapatan Daerah Provinsi itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Adapun Tujuan dan sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (2019-2024)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	
			Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Pendapatan Daerah (juta rupiah)	0	8.736.933	9.183.965	8.656.846	8.226.767	8.647.077	34.080.360
2.a	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	100	100	100	100
2.b	Rasio Efektivita Dana Transfer	-	-	-	100	100	100	100
2.c	Rasio Efektivitas Lain-Lian Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	76	85	90	92	95	95

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Penutup

Rancangan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini berfungsi sebagai pedoman, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagai unit pengelola pendapatan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Di samping itu, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pendapatan serta asset daerah secara transparan. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD tahun 2019-2024 secara lebih substansi bagi masyarakat Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Akhir kata semoga Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, kedepan sangat mungkin diperlukan saran dan masukan terkait penyusunan Rencana Strategis ini guna penyempurnaan kearah yang lebih baik.